

**STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR :
10 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN PASAR
(STUDI KASUS DI CABANG JOHAR
DINAS PASAR KOTA SEMARANG)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

**YEARZY FERDIAN
D4E002121**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
KONSENTRASI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

2005

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, juga tidak terdapat atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan kecuali tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang 27 Desember 2004



Yearzy Ferdian

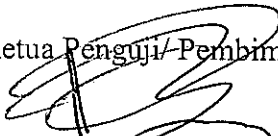
**STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR :
10 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN PASAR
(STUDI KASUS DI CABANG JOHAR
DINAS PASAR KOTA SEMARANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh
YEARZY FERDIAN
D4E002121

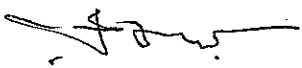
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 27 Desember 2004

Susunan Tim Penguji

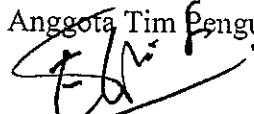
Ketua Penguji/ Pembimbing I,



Dr. H. Purbayu Budi Santoso, MS

Sekretaris Penguji/ Pembimbing II,


Drs. Hardi Warsono, MTP

Anggota Tim Penguji lain :


1. Dra. Hj. Endang Larasati, MS

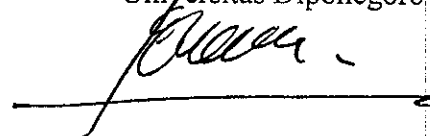

2. Dra. Diah Haryani, MM

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal : 27 Desember 2004

Ketua Program Studi MAP

Universitas Diponegoro


Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D.

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 4094/7/MAP/ei.
Tgl. : 29-11-05

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar (Studi Kasus Di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang)”.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan tesis ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, pengarahan, petunjuk serta dorongan yang telah diberikan sehingga tersusun tesis ini kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph. D selaku Ketua Program Studi MAP Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. H. Purbayu Budi Santoso, MS selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Drs. Hardi Warsono, MTP selaku Dosen Pembimbing II, Ibu Dra. Hj. Endang Larasati, MS dan Dra. Diah Haryani selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan bagi penulisan tesis ini.
3. Bapak Kepala Dinas Pasar Kota Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di instansinya.
4. Ibunda dan Saudara-saudaraku yang tercinta, berkat doa restu dan dorongan dalam segala hal penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Mba Munil, yang telah memberikan doa dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Istriku tercinta Dita, yang telah memberikan doa dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Teman-teman sepenanggungan dan seperjuangan mahasiswa MAP Angkatan VIII Reguler Tahun 2003 yang telah belajar bersama di MAP Universitas Diponegoro dalam suka maupun duka.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun ini merupakan hasil maksimal yang dapat penulis sajikan, oleh karena itu kritik dan saran dengan terbuka saya terima demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 27 Desember 2004

Penulis,

Yearzy Ferdian

RINGKASAN

Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pembiayaan otonomi daerah berusaha semakin efektif melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu salah satunya melalui penggalian retribusi pasar dan sebagai bentuk konsekuensi atas jasa retribusi yang ditarik tersebut Pemerintah Kota Semarang melakukan pengaturan pasar yang arahnya pada peningkatan pelayanan dibidang perpasaran sesuai undang-undang yang berlaku. Peraturan Pemerintah Kota Semarang mengenai pengaturan pasar adalah Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam usaha melakukan pengaturan, pembinaan dan penataan pedagang disuatu pasar yang arahnya pada peningkatan pelayanan sebagai bentuk konsekuensi atas jasa retribusi yang dibayar oleh para pedagang yang menempati pasar. Permasalahan yang muncul dalam implementasi Perda Pengaturan Pasar adalah implementasi kebijakan tersebut belum berhasil secara maksimal terlihat dari kecilnya selisih realisasi pendapatan retribusi pasar semester pertama di Cabang Johar dan masih kurangnya pelayanan yang diberikan, dimana beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab permasalahan adalah tingkat komunikasi, sumber daya dan sikap aparat pelaksana. Kemudian untuk menganalisis fenomena tersebut difokuskan pada implementasi kebijakan dengan menggunakan landasan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edwards III serta Van Metter dan Van Horn.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan, hipotesis-hipotesis minor dan mayor yang diajukan dalam penelitian diterima. Hipotesis minor, terdapat hubungan antara tingkat komunikasi (X1) dengan implementasi kebijakan (Y), dimana Z-hitung 6,917 > Z-tabel 2,74 (sig 1 %) dan 1,161 (sig 5 %) dan KD sebesar 42,02 %. Terdapat hubungan antara sumber daya (X2) dengan implementasi kebijakan (Y), dimana Z-hitung 7,278 > Z-tabel 2,74 (sig 1 %) dan 1,161 (sig 5 %) dan KD sebesar 49,84 %. Terdapat hubungan antara sikap aparat pelaksana (X1) dengan implementasi kebijakan (Y), dimana Z-hitung 6,577 > Z-tabel 2,74 (sig 1 %) dan 1,161 (sig 5 %) dan KD sebesar 40,70 %. Hipotesis mayor, terdapat hubungan antara tingkat komunikasi (X1), sumber daya (X2) dan sikap aparat pelaksana (X3) dengan implementasi kebijakan (Y), dimana $X \geq 141,904 > X\text{-tabel } 69,7$ (sig 1 %) dan 67,5 (sig 5 %) dan KD sebesar 52,42 %. Kemudian hasil diskusi menunjukkan terdapat kesesuaian antara teori yang menjadi landasan penelitian dengan hasil penelitian dilapangan, terlihat dari diterimanya hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Selanjutnya hasil diskusi menunjukkan bahwa secara urut kuatnya hubungan dan besarnya pengaruh adalah (1) sumber daya, (2) tingkat komunikasi dan (3) sikap aparat pelaksana.

Implikasi yang muncul apabila tingkat komunikasi, sumber daya dan sikap aparat pelaksana kurang mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang maka kemungkinan yang terjadi akan menghambat implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ketiga faktor yang menjadikan terhambatnya implementasi kebijakan tersebut untuk segera dilakukan demi memperbaiki

implementasi Perda Pengaturan Pasar sehingga harapan berhasilnya implementasi kebijakan terbuka untuk tercapai. Berdasarkan hal tersebut Penulis memberikan beberapa saran yaitu perlunya mengambil variabel yang tidak dijadikan variabel independen dalam penelitian ini, pelatihan petugas pasar, fasilitas-fasilitas pelayanan ditingkatkan, setiap petugas pasar dan pedagang diberi buku perda pasar, perlunya memuat materi-materi perda pasar yang komprehensif dan detil, proses komunikasi perda pengaturan pasar lebih intensif, pelatihan sikap bagi petugas pasar, dan pemberian papan informasi di loket perijinan dan di setiap pasar, serta pendataan dan korporasi tiap lembar retribusi pasar untuk mencegah kebocoran pendapatan dari retribusi pasar.

ABSTRAKSI

YEARZY FERDIAN, 2004, STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR : 10 TAHUN 2000 TENTANG
PENGATURAN PASAR (STUDI KASUS DI
CABANG PASAR JOHAR DINAS PASAR KOTA
SEMARANG)

Kata kunci : implementasi, komunikasi, sumber daya dan sikap kerja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang dipengaruhi oleh tingkat komunikasi, sumber daya dan sikap aparat pelaksana. Berdasarkan tujuan penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penjelasan/ eksplanatori, dengan instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Teknik sampling yang digunakan adalah purposif sampling dan proporsional random sampling Kemudian untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan peneliti menggunakan rumus Koefisien Korelasi Rank Kendall untuk menguji hipotesis minor yang diajukan, Koefisien Konkordansi Kendal untuk menguji hipotesis mayor yang diajukan, dan Koefisien Determinan (KD) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y atau hipotesis minor dan seberapa besar pengaruh variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y atau hipotesis mayor. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa hipotesis-hipotesis minor dan mayor yang diajukan dalam penelitian diterima. Hasil diskusi menunjukkan terdapat kesesuaian antara teori yang menjadi landasan penelitian dengan hasil penelitian dilapangan, terlihat dari hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Selanjutnya hasil diskusi menunjukkan bahwa secara urut kuatnya hubungan dan besarnya pengaruh adalah (1) sumber daya, (2) tingkat komunikasi dan, (3) sikap aparat pelaksana.

ABSTRACT

Yearzy Ferdian, 2004, THE STUDY OF TERRITORIAL REGULATION IMPLEMENTATION NUMBER : 10 IN THE YEAR OF 2000 ABOUT MARKET ARRANGEMENT (CASE STUDY ON JOHAR MARKET CITY MARKET AFFAIR OF SEMARANG)

Key word : policy implementation, communication, resource and attitude

The aim of the research is to know how far the implementation of the local regulation of number : 10 in the year of 2000 as to the arrangement of market in the branch of pasar johar semarang city effected by the level of communication, resource and the attitude of the official. Based on the aim of the research that is used is explanatory type, by using questionair. The sampling technique used is purposif sampling and random proposional sampling and then they are tested the hiphotesys by using minor hyphotesys. Kendal cocordiantion coefision to test major hyphoteys and determinant coefision (KD) to test how big the influence of X variable toward Y Variable or minor hyphotesys and how big the influence of X variable toward Y variable or major hypothesys. The result of the research means that minor and major hypothesys proposed in the accepted research. The result of the discussion shows that there are the harmony between the theory used and the practice, it can be seen from the hiphotesys proposed in the research. The result of the discussion shows that the strength of the relation and the big influence in a row is resource, the level of communication and the officials.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN	iv
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	16
B.1. Identifikasi Masalah.....	16
B.2. Perumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Landasan Teori	19
B. Variabel-variabel Penelitian	23
B. 1. Implementasi Kebijakan (Y).....	23
B. 2. Tingkat Komunikasi (X_1).....	26

B. 3. Sumber Daya (X_2).....	30
B. 3. Sikap Aparat Pelaksana (X_3).....	34
C. Hipotesis.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Rancangan Penelitian.....	41
B. Ruang Lingkup Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Variabel Penelitian.....	42
E. Jenis dan Sumber Data.....	48
F. Instrumen Penelitian.....	49
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	51
H. Teknik Pengumpulan Data	55
I. Teknik Analisis Data.....	56
J. Pengujian Hipotesis.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN HASIL	
 PENELITIAN..	61
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	61
B. Penyajian Data.....	64
B. 1. Identitas Responden.....	64
B. 2. Implementasi Kebijakan (Y).....	67
B. 3. Tingkat Komunikasi (X_1).....	75

B. 4. Sumber Daya (X2).....	81
B. 5. Sikap Aparat Pelaksana (X3).....	88
C. Analisis Data dan Pengujian hipotesis.....	94
D. Diskusi.....	110
BAB V PENUTUP.....	116
A. Simpulan.....	116
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

MATRIK KUESIONER

DAFTAR PERTANYAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pasar	8
Tabel I. 2.	Profil Pasar Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang 2003..	10
Tabel I. 3.	Target dan Realisasi Retribusi Pasar Cabang Pasar Johar Dinas Pasar Kota Semarang 2004	12
Tabel I. 4.	Jumlah dan Tingkat Pendidikan Petugas Pemungut Retribusi Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang	14
Tabel III. 1.	Sampling Frame Daftar Seluruh Pedagang Di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang	52
Tabel III. 2.	Sampling Fraction Daftar Pedagang Di cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang	53
Tabel III. 3.	Sampling Size Daftar Pedagang Di cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang	54
Tabel IV. 1.	Usia Responden.....	64
Tabel IV. 2.	Jenis Kelamin Responden.....	65
Tabel IV. 3.	Pendidikan Terakhir Responden	65
Tabel IV. 4.	Lokasi Berjualan	66
Tabel IV. 5.	Jenis Dagangan	66
Tabel IV. 6.	Pengetahuan Pedagang Tentang Perda	67
Tabel IV. 7.	Penguasaan Informasi Kebijakan Aparat Tentang Pengaturan Pasar.....	68
Tabel IV. 8.	Pemahaman Pedagang tentang Perda	68

Tabel IV. 9. Proses Perijinan Pedagang.....	69
Tabel IV. 10. Fasilitas Pelayanan Kebijakan	69
Tabel IV. 11. Kesesuaian Tarif Retribusi yang Dibebankan kepada Pedagang	70
Tabel IV. 12. Manfaat Kebijakan Pengaturan Pasar	70
Tabel IV. 13. Pedagang Menjaga Kebersihan Tempat Berdagang	71
Tabel IV. 14. Motivasi Pedagang dalam Mendukung dan Ikut Serta Menyukseskan Perda No. 10 tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar	71
Tabel IV. 15. Fasilitas yang Diterima Pedagang	72
Tabel IV. 16. Klasifikasi Skor Variabel Implementasi Kebijakan	73
Tabel IV. 17. Rekapitulasi Penilaian Variabel Implementasi Kebijakan....	74
Tabel IV. 18. Pengarahan Aparat dalam 1 Minggu	75
Tabel IV. 19. Lancarnya Informasi Kebijakan Pengaturan Pasar	75
Tabel IV. 20. Penggunaan Bahasa yang Mudah Dipahami oleh Pedagang....	76
Tabel IV. 21. Terperincinya Informasi Kebijakan tentang Pengaturan Pasar	76
Tabel IV. 22. Jelasnya Informasi tentang Pengaturan Pasar	77
Tabel IV. 23. Media Komunikasi Memperjelas Informasi Kebijakan.....	77
Tabel IV. 24. Sesuainya Informasi yang Diterima dengan yang Tertera dalam Perda	78
Tabel IV. 25. Sesuainya informasi yang Diterima dengan yang Disampaikan Aparat.....	78
Tabel IV. 26. Klasifikasi Skor Variabel Tingkat Komunikasi.....	79

Tabel IV. 27. Rekapitulasi Penilaian Variabel Tingkat Komunikasi.....	80
Tabel IV. 28. Kemampuan Aparat dalam Menjalin Kerjasama.....	81
Tabel IV. 29. Kemampuan Aparat dalam Pendekatan Personal untuk Menyelesaikan Konflik	81
Tabel IV. 30. Kemampuan Aparat Melakukan Ide-ide Pembaharuan dalam Pengaturan Pasar.....	82
Tabel IV. 31. Kemampuan Aparat dalam Menjalankan Rencana-rencana Kebijakan Pengaturan Pasar.....	82
Tabel IV. 32. Kemampuan Aparat dalam Memberikan Pemahaman terhadap Prosedur-prosedur pelayanan.....	83
Tabel IV. 33. Fasilitas Bangunan Pasar	83
Tabel IV. 34. Fasilitas Keamanan.....	84
Tabel IV. 35. Fasilitas Penerangan	84
Tabel IV. 36. Fasilitas MCK	85
Tabel IV. 37. Fasilitas Kebersihan	85
Tabel IV. 38. Klasifikasi Skor Variabel Sumber Daya.....	86
Tabel IV. 39. Rekapitulasi Penilaian Variabel Sumber Daya.....	87
Tabel IV. 40. Aparat Petugas Pasar Loyal terhadap Peraturan Menarik Retribusi dan Pengaturan Pasar.....	88
Tabel IV. 41. Pengabdian Aparat Petugas Pasar terhadap Perda Pengaturan Pasar	88
Tabel IV. 42. Aparat Petugas Pasar Bertanggungjawab dalam Pengaturan Pasar.....	89

Tabel IV. 43. Aparat Petugas Pasar Menaati Ketentuan Retribusi	90
Tabel IV. 44. Petugas Pasar Sopan dalam Menjalankan Tugasnya.....	90
Tabel IV. 45. Kejujuran dalam Memberikan Besarnya Tarif Retribusi.....	91
Tabel IV. 46. Kejujuran dalam Memberikan Pelayanan Perijinan	91
Tabel IV. 47. Klasifikasi Skor Variabel Sikap Aparat Pelaksana.....	92
Tabel IV. 48. Rekapitulasi Penilaian Variabel Sikap aparat Pelaksana.....	93
Tabel IV. 49. Tabulasi Silang antara Tingkat Komunikasi (X1) dengan Implementasi Kebijakan (Y).....	95
Tabel IV.50. Tabulasi Silang antara Sumber Daya (X2) dengan Implementasi Kebijakan (Y).....	97
Tabel IV. 51. Tabulasi Silang antara Sikap Aparat Pelaksana (X3) dengan Implementasi Kebijakan (Y)	99
Tabel IV. 52. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinan Hasil Penelitian	113
Tabel V. 1. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinan Hasil Penelitian	117

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca reformasi tuntutan desentralisasi kewenangan dalam sistem pemerintahan Indonesia mulai santer digulirkan yang pada akhirnya secara internal menjadi *issue sentral* dan diskursus yang ramai baik dilevel para birokrat, mahasiswa, dosen maupun elemen masyarakat lainnya. Sebagai bentuk aspiratif dari tuntutan tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Daerah yang lama yang dianggap sudah tidak relevan lagi diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berkaitan dengan adanya otonomi daerah tersebut, ada dua hal yang perlu dicermati sebagai suatu implikasi dari munculnya undang-undang tersebut, yaitu bahwa disatu sisi akan menimbulkan kemandirian pada kabupaten/ kota dalam pembiayaan urusan-urusan kabupaten/ kota tetapi disisi lain kabupaten/ kota akan dituntut semakin efektif dalam menggali sumber-sumber pendapatannya mengingat adanya subsidi dari pemerintah pusat yang berkurang.

Ketika Indonesia mulai memberlakukan undang-undang tersebut dan ternyata yang terjadi dilapangan belum banyak kabupaten/ kota yang telah siap untuk melakukan implementasi undang-undang otonomi daerah. Pemberlakuan undang-undang tersebut membawa dampak yang besar bagi kabupaten/ kota

terutama kabupaten/ kota yang tidak terlalu kaya dengan sumber daya alamnya.

Dampak-dampak tersebut terjadi, antara lain:

1. Semakin bertambahnya urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/ kota ini akan berujung pada semakin besarnya dana yang akan disediakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan urusan rumah tangganya, sehingga kabupaten/ kota yang miskin akan sumber daya alamnya akan mencari sumber pendapatan lain yang sekiranya dapat mengatasi kekurangan dana dan tidak terlalu menggantungkan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Hal tersebut tentunya menjadi suatu tantangan bagi pemerintah kabupaten/ kota untuk lebih cepat mengembangkan diri menjadi kabupaten/ kota yang mandiri dan mampu untuk membiayai seluruh kebutuhannya dalam menjalankan roda pemerintahannya:
2. Setiap pemerintah kabupaten/ kota dituntut untuk meninjau kembali organisasi dan sistem pemerintahan daerahnya serta menciptakan dan mengembangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia disetiap instansi pemerintah, juga menciptakan sikap profesionalisme bagi setiap aparat birokrasi.
3. Selain itu pemerintah kabupaten/ kota dituntut untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada para birokrat untuk mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan sendiri.

Dampak-dampak tersebut di atas memaksa pemerintah kabupaten/ kota melihat kembali potensi yang dimiliki untuk menambah pendapatannya dengan

menggali sumber-sumber pendapatan yang baru. Melihat kenyataan ini pemerintah kabupaten/ kota perlu mencari solusi untuk memecahkan persoalan tersebut. Adapun salah satu usaha untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Semarang berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam rangka meningkatkan pendapatannya tersebut adalah penggalian pendapatan dari pengelolaan pasar berupa retribusi pasar yang memasuki implementasi otonomi daerah dianggap strategis dalam memberikan kontribusi yang positif bagi PAD untuk lingkup Pemerintah Kota Semarang.

Peraturan mengenai masalah pasar di Kota Semarang sendiri ada dua kebijakan yang berupa peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pasar Kota Semarang dan Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar Kota Semarang. Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pasar, mengatur tentang retribusi pasar saja sedangkan Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar Kota Semarang merupakan peraturan untuk menjelaskan peraturan yang belum tertampung pada peraturan tentang retribusi pasar.

Dalam konteks penelitian ini dipusatkan pada studi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar Kota Semarang. Namun demikian, untuk memperdalam dan memperkuat penelitian penulis mencoba menggambarkan mengenai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor: 9 Tahun 1998; dalam pasal 1 dinyatakan bahwa retribusi pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum dilingkungan dalam pasar.

Menurut pasal 3 Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 1998 disebutkan bahwa jasa yang diberikan oleh Dinas Pasar meliputi:

1. Penyediaan fasilitas bangunan pasar.
2. Penyediaan fasilitas pengamanan.
3. Penyediaan fasilitas penerangan umum.
4. Penyediaan fasilitas umum lainnya.

Kemudian dalam studi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar menurut Bab I Ketentuan Umum pada pasal 1 disebutkan, dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Semarang;
- f. Pasar adalah suatu tempat yang disediakan secara tetap oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain sebagai tempat jual beli umum dan secara langsung memperdagangkan barang dan jasa;
- g. Perpasaran adalah kegiatan penyaluran, perputaran barang dan jasa di pasar yang bertalian dengan penawaran dan permintaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

- h. Fasilitas perpasaran lainya adalah fasilitas-fasilitas yang disamakan dengan pasar dan tempat jual beli umum lainya yang menempati tanah-tanah yang dikuasai pemerintah Daerah;
- i. Pemakai tempat adalah orang atau badan hukum yang mempergunakan tempat yang merupakan bagian pasar dan atau fasilitas perpasaran lainya.
- j. Feralihan hak pemakaian tempat ialah peralihan hak pemakaian tempat di pasar dan fasilitas perpasaran lainya dari orang dan atau badan hukum kepada orang dan atau badan hukum lain;

Mengenai pengurusan, pembinaan, penataan pasar dan fasilitas perpasaran lainya diatur dalam Bab IV Pengurusan, Pembinaan, Penataan Pasar dan Fasilitas Perpasaran lainya dari pasal 7 sampai dengan pasal 10, pada intinya bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pengelolaan, pembinaan pedagang, dan penataan pedagang adalah walikota.

Dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar juga disebutkan tentang masalah perijinan yaitu pada Bab VI pasal 12, dimana dalam pemakaian tempat berdagang para pedagang harus mendapat ijin tertulis dari walikota atau dapat dialihkan pada pihak lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh walikota dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi yang diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum ijin berakhir. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ijin berakhir tidak melakukan perpanjangan, maka walikota dapat mengalihkan hak pemakaian tempat berdagang kepada pihak lain.

Selanjutnya berkaitan dengan pungutan yang harus dibayar pedagang di atur dalam Bab VII Jenis dan Besarnya Pungutan, pasal 13. Jenis pungutan di pasar meliputi:

- a. Retribusi pasar;
- b. Retribusi kebersihan;
- c. Retribusi parkir;
- d. Pemakaian listrik;
- e. Biaya balik nama pemakaian tempat;
- f. Pungutan-pungutan lainnya yang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian mengenai hak pedagang diatur dalam Bab IX Hak, Kewajiban dan Larangan, dimana dalam pasal 16 di sebutkan mengenai hak pedagang yaitu:

Setiap Pemakai tempat di pasar mempunyai hak:

1. Mendapatkan pelayanan perijinan.
2. Penyediaan fasilitas bangunan pasar.
3. Penyediaan fasilitas bangunan umum.
4. Penyediaan fasilitas lainnya.
5. Penyediaan fasilitas pengamanan.

Dalam peraturan tersebut, bahwa pedagang oleh Pemerintah Kota Semarang di tarik pungutan-pungutan yang berupa retribusi dan pungutan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang lakukan disetiap pasar diseluruh wilayah Kota Semarang, hal ini diadakan untuk menghimpun dana pembangunan masyarakat guna meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, atas pungutan-pungutan yang ditarik oleh Pemerintah Kota Semarang pedagang mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang sesuai yang diatur dalam peraturan daerah. Kemudian dalam usaha untuk menjembatani hal tersebut di atas pemerintah melakukan pengaturan pasar, pembinaan dan penataan pada pedagang yang arahnya pada peningkatan pelayanan.

Di bawah ini hasil dari realisasi pendapatan retribusi yang dihasilkan oleh Dinas Pasar Kota Semarang dan juga disertai dengan target yang direncanakan yang dapat dilihat dalam tabel. I, berikut:

Tabel I. 1
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
DINAS PASAR KOTA SEMARANG TAHUN 2002 DAN TAHUN 2003

No	Jenis PAD	2002			2003		
		Target	Realisasi/ %	Selisih	Target	Realisasi/ %	Selisih
1	Retribusi Harian	1.875.000.000	2.047.832.450/ 109, 22	+175.832.450	2.034.433.000	2.402.281.850/118, 08	+367.848.850
2	Retribusi Bulanan	2.223.858.000	1.826.220.501/82, 12	-397.637.499	2.223.858.000	1.834.648.553/82,49	-389.209.447
3	Retribusi Kebersihan	475.542.000	593.645.410/124, 84	+118.103.410	494.301.000	489.498.850/99, 03	+4.802.150
4	MCK	162.000.000	185.075.000/114, 24	+23.075.000	180.000.000	204.772.000/113, 76	+24.772.000
5	Sumbangan Listrik	505.600.600	574.987.788/113, 73	+69.387.788	720.000.000	666.517.294/92, 57	-53.482.706
6	Lain-Lain	133.000.000	107.752.975/81, 01	-25.247.025	122.520.000	111.701.800/91, 16	-10.818.200
	Jumlah	5.375.000.00	5.335.514.124/99, 26	-39.485.025	5.775.112.000	5.709.420.347/98, 86	-56.087.350

Sumber: Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2004

Pada tahun 2002 secara umum Dinas Pasar Kota Semarang tidak dapat merealisasikan target pencapaian retribusi yang dibebankan oleh Pemerintah Kota Semarang. Beberapa sektor retribusi yang tidak dapat merealisasikan target yang dibebankan adalah retribusi bulanan, retribusi kebersihan, retribusi MCK dan retribusi lain-lain, sedangkan sektor retribusi yang mampu merealisasikan target yang dibebankan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah retribusi harian dan sumbangan listrik. Tidak tercapainya target ini dikarenakan dana dugderan sebesar Rp. 40.000.000,00 disetor ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sedangkan menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dana ini harus disetor ke Dinas Pasar.

Kemudian untuk tahun 2003 Dinas Pasar Kota Semarang secara umum tidak mampu merealisasikan target yang dibebankan oleh Pemerintah Kota Semarang, sektor retribusi yang mampu merealisasikan target yang dibebankan adalah retribusi harian, retribusi kebersihan dan MCK. Selanjutnya beberapa sektor retribusi yang tidak merealisasikan target yang dibebankan yaitu retribusi bulanan, sumbangan listrik dan retribusi lain-lain. Jadi secara umum disini Dinas Pasar Kota Semarang tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan Pemerintah Kota Semarang.

Permasalahan lain yang muncul bahwa berkaitan dengan surat edaran dari Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang rencana Pemerintah Kota Semarang untuk mengadakan bulan layanan publik yang dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2004–31 Maret 2004 telah ditemukan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kebijakan pengaturan pasar yaitu, adanya peralatan kebersihan

yang kurang, tempat pembuangan sampah yang kurang memadai, dan penempatan kontainer yang mengganggu lingkungan. Masalah lain yang timbul adalah adanya proses perijinan untuk berdagang dipasar yang terlalu lama, biaya yang cukup tinggi serta birokrasi yang berbelit-belit.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, tampak sekali bahwa dilihat dari target pencapaian retribusi pertahun dan dilihat dari sisi pemenuhan pelayanan yang diberikan kepada pedagang bahwa secara umum implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar Kota Semarang kurang berhasil secara maksimal.

Dalam rangka mempersempit sebuah permasalahan penelitian ini, penulis berusaha mengkaji studi implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar dengan mempersempit lokasi penelitian yaitu di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang.

Kemudian berikut ini, penulis sajikan mengenai profil Dinas Pasar Kota Semarang Cabang Johar yang dapat dilihat pada tabel I. 2, berikut:

Tabel I.2
PROFIL PASAR CABANG JOHAR
DINAS PASAR KOTA SEMARANG 2003

No	Nama Pasar	Luas Lahan (M2)	Fasilitas Umum			Jumlah Pedagang (orang)			Jumlah
			MCK	Parkir	TPS	Kios	Los	Dsr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Johar Utara	5440	2	-	-	297	265	394	956
2	Johar Tengah	5467	1	-	-	345	271	245	861
3	Johar Selatan	5473	4	-	-	178	512	93	783
4	Kanjengan	2995	3	-	-	-	136	450	586
5	Ya'ik Permai	8820	12	750	1	130	139	421	690
6	Ya'ik Baru	5027	32	200	-	58	289	193	540
Jumlah		33212	54	950	1008	1008	1612	1796	4416

Sumber: Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2004

Dari data di atas dapat digambarkan bahwa dilihat dari fasilitas umum yang dimiliki terlihat dari profil pasar Kota Semarang Cabang Johar terlihat adanya fasilitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Cabang Johar tersebut ada beberapa pasar yang tidak memiliki TPS meliputi Johar Utara, Johar Tengah, Johar Selatan, Kanjengan, dan Ya'ik Baru, hanya satu pasar saja yang memiliki TPS di Cabang Johar yaitu Yaik Permai. Berdasarkan uraian di atas tersebut, jika dicermati dapat dijelaskan adanya kondisi pasar yang luas dan dihuni oleh ribuan pedagang tentunya akan menghasilkan volume sampah yang sangat besar dan ini memerlukan TPS yang banyak untuk menampung sampah-sampah tersebut. Disamping itu sebagai bentuk dari retribusi kebersihan yang dibayarkan oleh pedagang, mereka berhak atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pasar Kota Semarang. Oleh karena itu kondisi yang terjadi di atas tentunya merupakan permasalahan yang menyangkut tataran implementasi berkaitan dengan tidak sebandingnya retribusi kebersihan yang mereka bayarkan dengan fasilitas TPS yang sangat minim.

Kemudian dilihat dari sisi fasilitas MCK sebagian besar Pasar Cabang Johar tersebut memiliki fasilitas MCK yang dinilai masih kurang, hanya di dua pasar yang memiliki fasilitas MCK yang relatif banyak yaitu Ya'ik Permai berjumlah 12 buah dan Ya'ik Baru berjumlah 32, sedangkan lainnya fasilitas MCK-nya masih kurang yaitu Johar Selatan 4 buah, Kanjengan 3 buah, Johar Utara 1 dan Johar Tengah 1. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas MCK di Pasar Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang dinilai masih kurang.

Tabel I.3
**TARGET DAN REALISASI CABANG PASAR JOHAR
 DINAS PASAR KOTA SEMARANG 2004**

Nama Pasar	Retribusi Pasar		Retribusi Kebersihan		Lain – Lain	
	Target	Realisasi s. d Juni/ %	Target	Realisasi s. d. Juni	Target	Realisasi s. d Juni/ %
Cabang Johar	1.495.600.000	769.024.000/51,41	-	-	548.000.000	320.248.600/58,43

Sumber: Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2004

Berdasarkan tabel I.3 di atas dapat dijelaskan bahwa di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang setelah memasuki semester pertama, walaupun selama setengah tahun pertama target yang ditetapkan lebih dari setengahnya diretribusi pasar dan lain-lain akan tetapi nilai selisihnya tidak begitu banyak. Oleh karena itu untuk semester depan dalam rangka merealisasikan target yang dibebankan dalam implementasi peraturan daerah tentang pengaturan pasar untuk semakin ditingkatkan dalam rangka mencapai target yang dibebankan dan ini tentunya diperlukan adanya komunikasi kebijakan yang lebih intensif, adanya sikap aparat petugas pasar yang semakin baik dan tentunya juga kemampuan aparat yang memadai dalam rangka semakin mendukung implementasi kebijakan tentang pengaturan pasar di Kota Semarang. Disamping itu, sebagai bentuk timbal balik dari adanya retribusi yang dibayarkan pedagang maka fasilitas-fasilitas yang ada dipasar-pasar tentunya semakin dimaksimalkan karena fasilitas yang memadai tersebut merupakan bentuk pelayanan yang diberikan sebagai konsekwensi atas retribusi yang dibayarkan oleh para pedagang sehingga kebijakan tersebut dalam prosesnya dan hasilnya dari sisi implementasi baik.

Kemudian berdasarkan informasi yang diterima oleh penulis bahwa fenomena rendahnya implementasi kebijakan Perda No. 10 tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar, diduga disebabkan oleh tiga faktor yaitu *pertama*, adanya tingkat komunikasi yang kurang efektif, dimana selama ini komunikasi yang dilakukan bersifat tidak rutin yang didasarkan tergantung pada volume permasalahan yang timbul. Media komunikasi yang digunakan selama ini berupa surat edaran dari dinas pada cabang kemudian baru kepada pedagang, media komunikasi semacam ini tentunya jika dicermati akan menimbulkan tidak tersampainya informasi bilamana cabang tidak menyampaikannya pada pedagang, kemudian dalam prosesnya bahwa informasi dari dinas yang disampaikan ke cabang tidak semuanya sampai kepedagang karena hanya disampaikan lewat perkumpulan pedagang saja. Permasalahan tersebut terjadi karena pelaksana kebijakan pasar menyadari tidak semua pedagang diberikan informasi kebijakan karena mereka sibuk dengan pembeli dan barang dagangannya.

Kedua, adanya kualitas aparat pelaksana yang dinilai masih kurang mendukung. Gambaran dari adanya aparat penarik pungutan retribusi pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang yang kemampuannya kurang mendukung tersebut terlihat dari tingkat pendidikannya yang umumnya rata-rata masih rendah, yang dapat dilihat dalam tabel I. 4, berikut:

Tabel I. 4
 JUMLAH DAN TINGKAT PENDIDIKAN
 PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI PASAR DI CABANG JOHAR
 DINAS PASAR KOTA SEMARANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2004

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	20	76,92
2	SMP	4	15,38
3	SMU/KPAA	2	7,69
Jumlah		26	100

Sumber: Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2004

Dari tabel I. 4 tersebut, dapat diketahui bahwa hampir sebagian besar petugas pemungut retribusi di Cabang Johar berpendidikan SD. Di Cabang Johar dari 26 petugas pemungut 20 orang atau 76,92% berpendidikan SD, lainnya SMP 4 orang atau 15,38% dan KPAA 2 orang atau 7,69%. Petugas pemungut retribusi merupakan aparat pelaksana kebijakan yang tidak hanya bertugas menarik retribusi saja tetapi mereka juga berkewajiban untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan pasar kepada para pedagang atau sasaran kebijakan publik.

Kemudian faktor *ketiga*, yang diduga menjadi faktor penyebab dari kurang maksimalnya implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar disebabkan oleh sikap aparat yang dinilai masih kurang mendukung hal ini bisa dilihat dari perilaku petugas pasar yang datangnya tidak sesuai dengan jadwal kerja, petugas jaga malam yang sering tidak hadir serta mereka hanya terkesan menarik retribusi saja tanpa memperhatikan kondisi kebersihan, penerangan dan keamanan pasar. Berkaitan dengan sikap aparat tersebut (**Suara Merdeka, 20 Mei 2004: 17**), bahwa juru pungut sering tidak memberikan karcis retribusi kepada pedagang, sehingga hasil yang diperoleh juru

pungut sering lebih besar dibanding target setoran. Bahkan disinyalir hasil dari sisa retribusi tidak hanya dinikmati oleh juru pungut bahkan sebagian sisa disetorkan pada atasannya.

Melihat gambaran di atas tersebut kiranya penelitian pengaturan pasar penting sekali dilakukan dalam usaha menganalisis penyebab terjadinya masalah dan mencari solusinya guna perbaikan kebijakan untuk tahun selanjutnya.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

B. 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas tersebut, dapat diidentifikasi pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar, yaitu:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang masih menunjukkan fenomena yang belum berhasil secara maksimal hal ini bisa dilihat dari secara umum kecilnya selisih realisasi pendapatan retribusi pasar memasuki semester pertama atau sampai dengan bulan Juni Tahun 2004 yang dibebankan dalam satu semester dan masih kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan.
2. Tingkat komunikasi yang diberikan aparat masih kurang maksimal dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang.
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan masih belum maksimal dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang.
4. Sikap aparat pelaksana kebijakan masih kurang mendukung implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang.

B. 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis kemukakan di atas tersebut, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“ Apakah kurang berhasilnya implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang di pengaruhi oleh tingkat komunikasi, sumber daya dan sikap aparat pelaksana?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan apa yang diungkapkan diatas maka tujuan yang menjadi harapan penulis, yaitu :

1. Untuk menganalisis sejauhmana implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang dipengaruhi oleh tingkat komunikasi.
2. Untuk menganalisis sejauhmana implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang dipengaruhi sumber daya.
3. Untuk menganalisis sejauhmana implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang dipengaruhi oleh sikap aparat pelaksana.

4. Untuk menganalisis sejauhmana hubungan implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang dipengaruhi oleh tingkat komunikasi, sumber daya dan sikap aparat pelaksana.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan rekomendasi untuk dipergunakan sebagai bahan kajian tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang di Dinas Pasar Kota Semarang.
2. Sebagai prasyarat kelulusan untuk meraih gelar Magister Administrasi Publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam menelaah suatu implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang, akan dicoba dijelaskan dengan konsep kebijakan publik yang secara spesifik akan coba dikaji dari sisi teori implementasi kebijakan publik itu sendiri. Oleh karena itu, teori yang mendasarinya adalah teori tentang kebijakan publik dan selanjutnya implementasi kebijakan publik itu sendiri.

Menurut James Anderson (Islamy, 1992: 17), merumuskan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaksana atau sekelompok pelaksana guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Dalam kerangka demikian maka hakekat suatu kebijakan tidak hanya bersifat ketentuan yang harus dipatuhi oleh objek kebijakan, tetapi juga diperlukan adanya konsistensi kepatuhan seluruh pihak yang terkait.

Sedangkan kebijakan memiliki orientasi pada kepentingan publik adalah memiliki pengertian yang lebih terkait dengan produk pemerintah. Menurut Thomas R. Dye (1978: 3) kebijakan publik di artikan "*whatever governments choose to do or not to do*" (Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Selanjutnya Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan (objektifnya) dan kebijakan pemerintah itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan

semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah saja.

Sementara itu secara khusus **Chief J. O. Udoji (Wahab,1999:15)** mendefinisikan kebijakan-kebijakan publik sebagai tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang dipusatkan pada suatu masalah atau kelompok masalah tertentu yang saling berkaitan dan mempunyai sebagian besar warga masyarakat.

Mengacu pada apa yang disampaikan di atas, maka kebijakan yang di ambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang memuat tentang beberapa aturan main yang melibatkan pemerintah maupun masyarakat dan untuk menjawab tantangan-tantangan serta tuntutan-tuntutan yang ada dalam masyarakat, baik oleh individu maupun organisasi.

Untuk itulah maka pemahaman yang dapat dikemukakan disini bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar merupakan suatu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, diperuntukan bagi para pedagang didalam pasar dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan perpasaran dilingkup Kota Semarang. Selanjutnya mengingat kajian penelitian penulis mengkaji dalam tataran implementasi maka dalam telaah analisisnya menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Menurut **George Edwards III (Imawan, 1999: 2)**, mengemukakan setidaknya ada empat variabel yang secara operasional menentukan keberhasilan /

kegagalan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Komunikasi maksudnya upaya mengalihkan (*transfer*) pemahaman tujuan kebijakan dari perencana ke pelaksana.
2. Sumber daya (*resources*) yang dimiliki, yang meliputi sumber daya, staff pelaksana lapangan, serta sumber materiil pendukung lainnya.
3. Disposisi / sikap yakni preferensi pelaksana untuk menentukan tahapan-tahapan yang paling mungkin dilakukan (*feasible*) yang boleh jadi sedikit menyimpang dari yang telah ditentukan. Penyesuaian dilakukan sejauh hal itu untuk mensiasati hambatan-hambatan yang ada di lapangan.
4. Struktur Birokrasi, sebagai penopang utama kebijakan publik.

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2001; 79-8) mengembangkan model yang disebut sebagai *A model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan), bahwa :

Jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan. Variabel-variabel bebas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ukuran dan tujuan kebijaksanaan
2. Sumber-sumber kebijaksanaan
3. Ciri-ciri atau sifat badan / instansi pelaksana
4. Komunikasi antar instansi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
5. Sikap para pelaksana.
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Variabel-variabel kebijaksanaan bersangkut paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antar organisasi berkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antar hubungan didalam sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasionalkan program dilapangan.

Berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Edwards III serta Van Meter dan Van Horn tersebut maka berkaitan dengan penelitian ini, saya mencoba mengambil landasan teori dalam penelitian ini. Untuk variabel Y peneliti mengambil implementasi, sedangkan variabel X1 adalah tingkat komunikasi yang diturunkan dari komunikasi (Edwards III) dan komunikasi antar instansi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan (Van Metter dan Van Horn), variabel X2 sumber daya yang diturunkan dari sumber daya (Edwards III) dan sumber-sumber kebijakan (Van Metter dan Van Horn) serta variabel X3 sikap aparat pelaksana yang diturunkan dari disposisi/ sikap (Edwards III) dan sikap para pelaksana (Van Metter dan Van Horn).

B. Variabel–variabel Penelitian

B. 1. Implementasi Kebijakan (Y)

Menurut Solichin Abdul Wahab (200: 61), studi implementasi kebijakan publik baru mulai diperhatikan oleh para ahli administrasi negara di Amerika Serikat dan Inggris pada awal 1970-an karena belum berhasilnya berbagai kebijakan pemerintah dalam mewujudkan reformasi kehidupan sosial.

Selanjutnya Budi Winarno (2002: 10–102), mengatakan implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi prosedur, dan teknik yang bekerja bersama–sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Oleh karena itu dalam rangka memahami tentang implementasi kebijakan tersebut berikut ini akan coba dikemukakan definisi dari implementasi yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan publik.

Mengenai pengertian implementasi itu sendiri telah dirumuskan dalam Kamus Webster (Wahab, 1990: 50), bahwa implementasi dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk Undang–Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Pemerintah Eksekutif, ataupun, Dekrit Presiden).

Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2000: 65), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

Those actions by public or private individuals or groups that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Sedangkan menurut George Edwards III (Purnaweni, 1991: 2) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai variasi tindakan yang luas yaitu membicarakan dan menyelenggarakan petunjuk, pendanaan, penjabaran informasi, menganalisa permasalahan, menolong dan membantu personil, mengumpulkan dan merencanakan reorganisasi dan lain-lain.

Kemudian Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Wahab, 2000: 65), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa :

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan uraian mengenai gambaran dalam pendahuluan kajian dan definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut bahwa implementasi ini mengandung dua hal pokok mendasar yaitu implementasi merupakan proses dan hasil.

Kemudian berkaitan dengan implementasi sebagai suatu proses dan outcome tersebut **Agus Dwianto (1999: 1)**, mengemukakan implementasi kebijakan setidaknya bisa dilihat dari dua perfektif, yaitu :

1. Dari sudut pandang proses, yaitu menekankan pada konsistensi pelaksanaan program atau kebijakan dengan policy guidelines yang merupakan petunjuk dari pelaksanaan program yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksanaan kelompok sasaran dan manfaat program. Program dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan policy guidelines.
2. Dari sudut pandang outcome, suatu program dikatakan berhasil kalau program tersebut menghasilkan dampak yang diharapkan.

Sementara itu, **Coraly Bryant (Bryant dan White, 1988: 199)**, mengemukakan bahwa keberhasilan program pembangunan dapat dilihat dari efisiensi program sebagai daya kerja yang mampu menciptakan:

1. Seberapa jauh program mengembangkan lembaga yang mampu menyelenggarakan jasa-jasa pelayanan baru dari waktu ke waktu.
2. Keefektifan program dalam menjangkau kelompok-kelompok target yang jelas dan tertentu.
3. Banyaknya perilaku yang terjadi.
4. Apakah organisasi telah memetik pelajaran dari pengalaman proyek dan mengubah keputusan sesuai dengan tugas pembangunan.
5. Apakah program berhasil dalam menggerakkan dan mengarahkan partisipasi masyarakat serta menambah kesadaran mereka mengenai kemampuan mereka sendiri.

Oleh karena itu berdasarkan dari pemahaman tentang implementasi tersebut dapat dirumuskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan yang berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan tersebut untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Kemudian berdasarkan pendapat dari Agus Dwianto dan Carline Bryant tersebut dalam penelitian ini variabel implementasi kebijakan publik (Y) sebagai indikatornya, yaitu:

1. Implementasi kebijakan dari sudut pandang proses
2. Implementasi kebijakan dari sudut pandang *outcome*

B. 2. Tingkat Komunikasi (X1)

Dalam implementasi kebijakan publik fungsi dari komunikasi signifikan dalam usaha memberikan pesan-pesan yang berupa informasi yang berkaitan dengan materi yang termuat dalam kebijakan publik tersebut. Artinya dengan ada proses komunikasi yang efektif memungkinkan adanya satu pemahaman dari pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan publik baik sebagai pelaksana maupun sasaran dari kebijakan publik tersebut sehingga akan menciptakan persamaan persepsi dalam implementasi kebijakan publik tersebut.

Menurut Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono (2002: 126), adalah:

Sesuatu yang sulit dibantah jika tidak ada komunikasi yang baik dalam implementasi kebijakan maka tinggal menunggu waktu kegagalan kebijakan publik. Banyak kebijakan yang tergantung pada komunikasi antara instansi pemerintah dengan *stakeholders* lainnya. Jika ini tidak berjalan dengan baik maka mengharap keberhasilan implementasi hanyalah spekulasi semata atau keberuntungan yang tidak terduga.

Menurut Miftah Thoha (1990: 115), komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau info dari seseorang kepada orang lain. Suatu komunikasi yang tepat tidak bakal terjadi kalau pihak penyampai

berita tadi menyampaikan secara tidak patut dan penyampai berita tidak menerimanya dalam bentuk distorsi.

Sementara itu Edwin Filippo (Jiwanto, 1985: 85), mendefinisikan komunikasi sebagai suatu tindakan mendorong pihak lain untuk menginterpretasikan suatu ide dalam suatu cara yang diinginkan oleh pembicara ataupun penulis.

Berdasarkan definisi dari ahli komunikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan berita atau info dari seseorang kepada orang lain untuk menginterpretasikan suatu ide dalam suatu cara yang diinginkan oleh komunikator.

Kemudian dalam kaitanya dengan implementasi kebijakan publik **George Edwards III (Winarno, 2002: 126–129)** mengemukakan dalam proses komunikasi kebijakan ada tiga hal yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan, yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Transmisi, sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya yang telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.
2. Kejelasan, jika kebijakan-kebijakan di implementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali intruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Namun demikian, ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi. Pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Sesuatu yang sering dihambat oleh intruksi-intruksi yang sangat spesifik menyangkut implementasi kebijakan.
3. Konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang dilaksanakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila unsur perintah tersebut bertentangan maka perintah itu tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi yang lain, perintah-perintah kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong pelaksana kebijakan akan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini proses komunikasi yang terjadi adalah komunikasi aparat pelaksana kebijakan dengan para pedagang selaku sasaran kebijakan. Sedangkan yang menjadi indikator dari variabel X1 tingkat komunikasi dalam penelitian ini, adalah :

1. Transmisi
2. Kejelasan
3. Konsistensi

B.3. Sumber daya (X2)

Sumber daya yang dimiliki oleh suatu institusi publik sangat di perlukan sekali dalam usaha untuk mendukung suatu implementasi kebijakan publik, manusia adalah sebagai unsur utama yang menjadi subjek yang menjalankan suatu implementasi sedangkan sumber-sumber yang lain seperti materi dan finansial menjadi sumber pendukung sekaligus alat untuk menciptakan efektifitas implementasi kebijakan publik.

Menurut George Edwards III (Winarno, 2002: 132–137), bahwa:

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara tidak cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Adapun sumber-sumber kebijakan tersebut menurut George Edwards III, dapat diterangkan sebagai berikut: meliputi:

1. Staf, barangkali sumber yang paling penting dalam rangka melaksanakan kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus di ingat jumlah tidak selalu mempunyai efek yang positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, namun disisi lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan.
2. Informasi, informasi merupakan sumber yang penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Kedua, data tentang kecakapan-kecakapan personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.
3. Wewenang, sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Wewenang ini akan selalu berbeda-beda dari satu program ke program lain serta mempunyai bentuk yang berbeda.
4. Fasilitas-fasilitas, fasilitas fisik mungkin pula merupakan sumber-sumber penting dalam organisasi. Seseorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus

mereka lakukan, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang dilaksanakan tidak akan berhasil.

Sementara itu menurut Henry Simamora (1993: 3), manajemen sumber daya manusia merupakan:

Pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Manajemen sumber daya manusia yang efektif mengharuskan manajemen menemukan cara terbaik dalam mengkaryakan orang-orang agar mencapai tujuan perusahaan dan meningkatkan kinerja organisasi. Lebih lanjut dijelaskan ada 4 tipe sumber daya yaitu finansial, fisik, manusia dan kemampuan teknologi dan sistem.

Kemudian secara umum sumber daya yang terdapat dalam organisasi dikelompokkan atas dua macam yakni; (1) Sumber daya manusia (*human resources*) dan, (2) Sumber daya non manusia (*non human resources*) yang termasuk kedalam sumber daya non manusia antara lain modal, teknologi dan peralatan.

Berdasarkan uraian di atas tersebut maka dapat disimpulkan sumber daya adalah sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya non manusia.

Sementara itu dalam kaitannya dengan sumber daya manusia biasanya identik dengan kemampuan yang merupakan sebuah istilah yang biasanya menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan. Kemampuan kerja berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan mental seseorang yakni untuk menunjuk apa yang dapat dikerjakan bukan apa yang telah dikerjakan.

A. S. Moenir (1987: 76), mendefinisikan kemampuan adalah kemampuan dalam hubungan dengan pekerjaan adalah suatu keadaan pada seseorang yang penuh kesungguhan, berdaya guna dan berhasil melaksanakan pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.

Kemudian menurut James L. Gibson (1990: 54), pengertian kemampuan adalah kemampuan kerja adalah sifat yang dibawa sejak lahir dan dipelajari yang memungkinkan seseorang menyelesaikan pekerjaan/ melaksanakan sesuatu yang bersifat mental maupun fisik .

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah satu potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dengan penuh kesungguhan, berdaya guna dan berhasil guna.

James L. Gibson (1990: 55), menjelaskan ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang aparat untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja, yaitu:

1. Kemampuan berinteraksi yang meliputi unsur-unsur:
 - Kemampuan seorang aparat untuk menciptakan dan menjaga hubungan-hubungan pribadi.
 - kemampuan seorang aparat untuk berkomunikasi dengan rekannya dengan efektif.
 - Kemampuan pekerja atau aparat untuk menangani konflik-konflik baik dengan orang lain maupun teman sekerjanya.
2. Kemampuan konseptual, yang meliputi unsur-unsur:
 - Kemampuan seorang aparat untuk menerima dan menganalisis informasi baik dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi.
 - Kemampuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
 - Kemampuan untuk melakukan perubahan dalam pekerjaan yang perlu dalam organisasi
3. Kemampuan administratif, yang meliputi unsur-unsur:
 - Kemampuan seorang aparat untuk mengembangkan dan mengikuti rencana-rencana kebijakan dan prosedur yang efektif.

- Kemampuan untuk memproses tata warkat atau kertas kerja dengan baik, teratur dan tepat waktu.
- Kemampuan untuk menggunakan pengetahuannya, peralatan-peralatan, pengalaman, dan teknis-teknis dari berbagai ilmu untuk memecahkan masalah.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas tersebut, maka yang menjadi indikator dari sumber daya adalah:

1. Kemampuan yang dimiliki parat pelaksana kebijakan, meliputi kemampuan interaksi, konseptual dan administrasi.
2. Fasilitas-fasilitas yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan, meliputi MCK, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), dan fasilitas penerangan serta fasilitas lainnya.

B. 4. Sikap aparat pelaksana (X3)

Sikap (Azwar, 1988: 3) dalam pengertian (1) Gordon Alfort, didefinisikan sebagai semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu obyek dengan cara-cara tertentu, sementara itu (2) Louis Thurstone dan Charles Ogwood mendefinisikan sikap, yaitu: suatu bentuk evaluasi dan reaksi perasaan.

Kemudian sikap (Sarwono; 1998), dalam pengertian (1) Berkovitz, sikap adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) ataupun perasaan perasaan objek tertentu. yang dimaksud dengan sikap (*attitude*) adalah *a favourable or unfavourable evaluative reaction to ward something or someone, exhibited in one's belief, feelings or intended behaviour* . Sedangkan menurut (2) Eagly & Chaiken, *attitude is a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor*.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan sikap aparat pelaksana adalah suatu bentuk evaluasi dan reaksi perasaan terhadap suatu obyek tertentu dari aparat pelaksana sehingga muncul suatu perasaan mendukung ataupun tidak mendukung suatu objek tertentu.

Dalam kaitanya dengan kebijakan publik tersebut **George Edwards**

III (Winarno, 2002: 143) mengemukakan:

Banyak kebijakan yang masuk kedalam “ zona ketidakkauan”. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pelaksana-pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Jika orang diminta untuk melaksanakan perintah-perintah yang tidak mereka setujui, maka kesalahan-kesalahan yang tidak dapat di elakan terjadi, yakni antara keputusan-keputusan kebijakan dan pencapaian kebijakan. Dalam kasus-kasus seperti ini, maka pelaksana kebijakan akan menggunakan keleluasaan dan kadang-kadang dengan cara-cara yang halus untuk menghambat implementasi.

Oleh karena itu bahwa dalam implementasi kebijakan sikap mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali dalam implementasi kebijakan dimana dengan adanya suatu sikap yang baik oleh para pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan tersebut akan memberikan suatu kontribusi yang positif bagi kesuksesan implementasi sebuah kebijakan demikian pula sebaliknya jika tidak adanya sikap yang baik dari pelaksana kebijakan maka memungkinkan terjadinya sebuah kegagalan dalam implementasi kebijakan publik lebih berpeluang terjadi.

Selanjutnya mengenai penjelasan sikap telah tercantum dalam PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pegawai Negeri Sipil. Ada delapan (8) unsur penilaian Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Negeri Sipil) yang ada relevansinya dengan penelitian penulis, yaitu antara lain:

1. Kesetiaan, adalah ketaatan, pengabdian dan kesetiaan kepada Pancasila dan UUD'45, negara dan pemerintah.
2. Prestasi kerja, adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja yaitu, kecakapan, ketrampilan, pengalaman, kesungguhan dan kesehatan.
3. tanggung jawab, adalah kesanggupan seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya, tepat waktu dan berani memikul resiko atas keputusan yang dibuatnya. Unsur-unsurnya yaitu :
 - b. Menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat pada waktunya
 - c. Kesalahan tidak dilemparkan pada orang lain.
 - d. Menyimpang dan memelihara barang milik negara.
 - e. Dalam segala keadaan tetap berada ditempat.
 - f. Mengutamakan kepentingan dinas.
 - g. Berani dan ikhlas memikul resiko.
4. Ketaatan, adalah kesanggupan seorang pegawai untuk menaati segala aturan perundang-undangan, peraturan kedinasan yang berlaku. Ketaatan ini meliputi, antara lain:
 - a. Menaati peraturan yang ada.
 - b. Menaati peraturan kedinasan dari atasan.
 - c. Memberikan layanan yang ada dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
 - d. Menaati ketentuan jam kerja serta sopan santun.
5. Kejujuran, adalah ketulusan hati dalam melaksanakan serta Kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
6. kerjasama, adalah Kemampuan seorang pegawai untuk bekerjasama dengan orang lain dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan sehingga memperoleh daya guna dan hasil guna.
7. Prakarsa, adalah Kemampuan Seorang pegawai untuk mengambil keputusan langkah-langkah serta melaksanakannya sesuai tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. Bagian-bagian dari prakarsa ini adalah:
 - a. Berkemauan memberi saran kepada atasan.
 - b. Berusaha mencari tata kerja baru yang lebih baik.
 - c. Tanpa menunggu perintah berkemauan menjalankan tugas.
8. Kepemimpinan, adalah kemampuan seorang pegawai atau pejabat untuk menyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.

Berdasarkan dari peraturan tersebut itulah, maka yang menjadi indikator dari variabel sikap aparat pelaksana, yaitu:

1. kesetiaan
2. Tanggung jawab
3. Ketaatan
4. Kejujuran

C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis verbal:

a. Hipotesis Mayor

- Terdapat pengaruh tingkat komunikasi (X1), sumber daya (X2) dan sikap aparat pelaksana (X3) terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang.

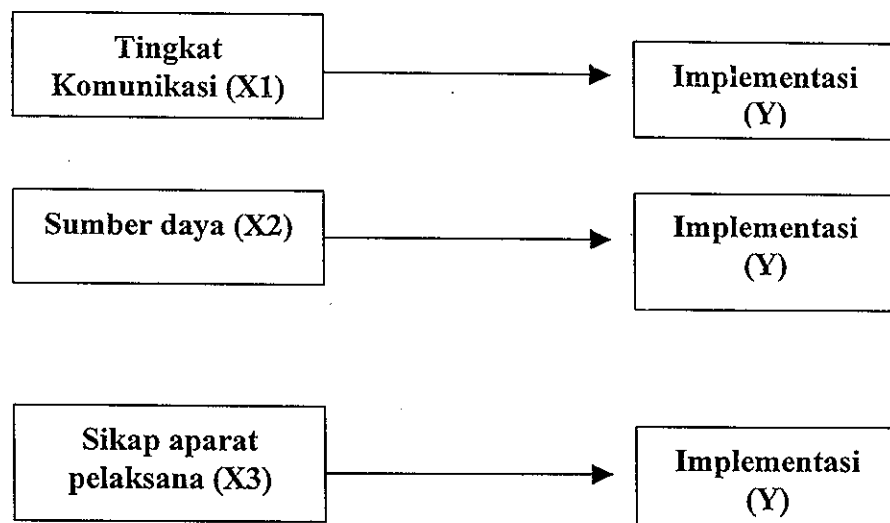
b. Hipotesis Minor

- Terdapat pengaruh tingkat komunikasi (X1) terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang.
- Terdapat pengaruh sumber daya (X2) terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang.

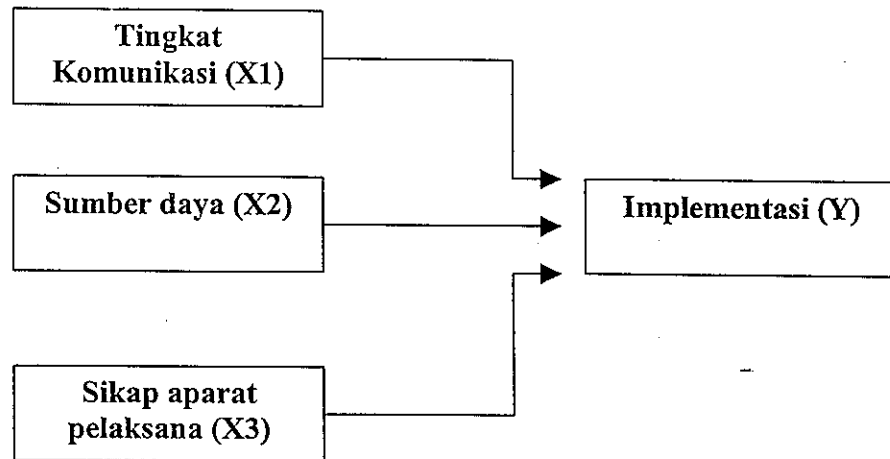
- Terdapat pengaruh sikap aparat pelaksana terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang.

2. Hipotesis Geometrical

a. Hipotesis minor



b. Hipotesis mayor



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Menurut Masri Singarimbun dan Sopian Effendi (1989: 3), tipe penelitian dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- a. Tipe penelitian eksploratif atau tipe penelitian penjajakan. Penelitian penjajakan bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum mempunyai hipotesa
- b. Tipe deskriptif, penelitian ini biasanya mempunyai dua tujuan yang pertama adalah mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya sesuatu aspek fenomena sosial tertentu, kedua adalah untuk mendeskripsikan secara terperinci eksplanatory/ penjelasan
- c. Tipe penelitian eksplanatory/ penjelasan
Penelitian ini menyoroti hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat Singarimbun dan Effendi, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatori (penjelasan) karena tipe penelitian ini bermaksud untuk menyoroti hubungan dan pengaruh antara variabel-variabel penelitian serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu mencoba mengetahui sejauhmana pengaruh tingkat komunikasi (X1), sumber daya (X2) dan sikap aparat pelaksana (X3) terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar (Y).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang.

D. Variabel Penelitian

1. Klasifikasi Variabel

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen/ variabel (Y) adalah implementasi kebijakan, sedangkan yang menjadi variabel independennya/ variabel (X) adalah untuk variabel X1 adalah tingkat komunikasi, X2 adalah sumber daya dan X3 adalah sikap aparat pelaksana.

2. Definisi Konseptual

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan yang berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan tersebut untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
2. Tingkat komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan berita atau info dari seseorang kepada orang lain untuk menginterpretasikan suatu ide dalam suatu cara yang diinginkan oleh komunikator.
3. Sumber daya, adalah sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya non manusia.

4. Sikap aparat pelaksana, adalah suatu bentuk evaluasi dan reaksi perasaan terhadap suatu obyek tertentu dari aparat pelaksana sehingga muncul suatu perasaan mendukung ataupun tidak mendukung suatu objek tertentu.

3. Definisi Operasional

1. Implementasi kebijakan (Y), indikator-indikatornya:

a. Implementasi dari sudut pandang proses, diukur dari:

1. Tingkat penguasaan aparat terhadap kebijakan dalam memberikan penjelasan tentang pengaturan pasar
 - ◆ Tingkat penguasaan petugas pasar terhadap aturan pengaturan pasar yang harus ditaati para pedagang
 - ◆ Tingkat pemahaman pedagang terhadap Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang.
2. Tingkat pelayanan yang diberikan kepada pedagang dalam kebijakan pengaturan pasar.
 - ◆ Kelancaran dalam proses pelayanan pengurusan proses perijinan untuk berdagang
 - ◆ Memadainya fasilitas pelayanan yang diberikan kepada pedagang dalam kebijakan pengaturan pasar

- ◆ Besarnya tarif retribusi pasar yang dibayar oleh pedagang sesuai dengan ketentuan besarnya tarif yang ditetapkan yang tertera dalam kebijakan pengaturan pasar
3. Tingkat manfaat kebijakan bagi sasaran kebijakan.
- ◆ Bermanfaatnya kebijakan pengaturan pasar bagi pedagang
2. Dari sudut pandang *outcome*, diukur dari:
1. Tingkat perubahan perilaku pedagang akibat pengaturan pasar oleh aparat petugas pasar
- ◆ Kedisiplinan pedagang dalam menjaga kebersihan pasar sesuai dengan aturan yang ditetapkan aparat petugas pasar.
 - ◆ Termotivasinya pedagang dalam mendukung dan ikut serta berpartisipasi menyukseskan kebijakan pengaturan pasar seperti anjuran aparat petugas pasar.
2. Tingkat peningkatan fasilitas pelayanan
- ◆ Meningkatnya fasilitas pelayanan yang diterima pedagang.

2. Tingkat Komunikasi (X1), indikator-indikatornya:

- a. Transmisi, diukur melalui:
- Kuantitas pengarahan dari aparat petugas pasar dalam satu minggu kepada pedagang.

- Lancarnya informasi yang disampaikan aparat kepada pedagang.
- Penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh pedagang dalam penyampaian informasi kebijakan pengaturan pasar yang disampaikan petugas pasar.
- Rincinya informasi kebijakan pengaturan pedagang yang diberikan petugas pasar kepada pedagang.

b. Kejelasan, diukur melalui:

- Jelasnya petugas pasar dalam menyampaikan informasi kebijakan pada pedagang.
- Media komunikasi yang digunakan petugas dalam menyampaikan informasi kebijakan pengaturan pasar memperjelas informasi yang diterima oleh pedagang .

c. Konsistensi, diukur melalui:

- Sesuainya informasi kebijakan pasar yang disampaikan petugas pasar dengan informasi yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang.
- Sesuainya informasi yang diterima pedagang dengan informasi kebijakan pengaturan pasar yang disampaikan aparat petugas pasar.

2. Sumber daya (X2), indikator-indikatornya:

a. Kemampuan yang dimiliki aparat pelaksana kebijakan, meliputi:

1. Kemampuan berinteraksi, diukur melalui:

- Baiknya kemampuan petugas pasar dalam menjalin kerjasama dengan pedagang.
- Baiknya kemampuan petugas pasar dalam melakukan pendekatan personal untuk menyelesaikan konflik antar pedagang.

2. Kemampuan konseptual, diukur melalui

- Baiknya kemampuan petugas pasar dalam menyampaikan ide-ide pembaharuan tentang pengaturan pasar.

3. Kemampuan administratif, diukur melalui:

- Baiknya kemampuan petugas pasar dalam menjalankan rencana-rencana kebijakan pengaturan pasar.
- Baiknya kemampuan pasar dalam memberikan pemahaman dan melaksanakan prosedur-prosedur yang berhubungan dengan kebijakan pengaturan pasar.

b. Fasilitas-fasilitas yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan, diukur dari:

1. Tersedianya fasilitas bangunan pasar yang memadai bagi pedagang.
2. Tersedianya fasilitas pengamanan yang memadai bagi pedagang.
3. Tersedianya fasilitas penerangan umum yang memadai bagi pedagang.
4. Tersedianya fasilitas MCK yang memadai bagi pedagang.
5. Tersedianya fasilitas Tempat Pembuangan Sampah (TPA) yang memadai bagi pedagang.

4. Sikap aparat pelaksana (X3), indikatornya diukur dengan:

a. Kesetiaan, meliputi :

- ◆ Petugas pasar loyal dalam mematuhi ketentuan besarnya tarif retribusi dan pengaturan pasar
- ◆ Pengabdian petugas pasar besar dalam menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan kebijakan pengaturan pasar

b. Tanggung jawab, meliputi :

- ◆ Bertanggungjawabnya petugas pasar dalam menjalankan tugasnya menarik retribusi dan mengatur pedagang.

c. Ketaatan, meliputi :

- ◆ Menaatinya petugas pasar pada kebijakan pengaturan pasar dalam menjalankan tugasnya menarik retribusi dan mengatur pedagang.
- ◆ Prilaku petugas pasar sopan dalam menjalankan tugasnya menarik retribusi dan mengatur pedagang.

d. Kejujuran, meliputi :

- ◆ Petugas jujur dalam memberikan besarnya tarif retribusi pasar kepada pedagang.
- ◆ Petugas jujur dalam memberikan pelayanan perijinan kepada pedagang.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan segala keterangan atau informasi mengenai hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu data kuesioner yang diberikan kepada pedagang yang merupakan responden penelitian.

b. Sumber data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen, buku, data statistik, laporan, peraturan-peraturan tentang pasar dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini, dimana peneliti dapat memperoleh secara tidak langsung.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan dalam wujud kuesioner yang didasarkan pada skala pengukuran yang kuantitatif yang diberikan pada responden penelitian.

Mengenai skala pengukuran ini menurut Sugiyono (1994: 70), ada 4 jenis skala pengukuran variabel, yaitu :

1. Skala pengukuran nominal atau Skala penggolongan
2. Skala pengukuran ordinal (penggolongan dan urutan)
3. Skala pengukuran interval (penggolongan, urutan dan jarak)
4. Skala pengukuran ratio (penggolongan, urutan jarak dan ratio)

Dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai alat utama dengan menggunakan pertanyaan terstruktur baik terbuka maupun tertutup, sedangkan pertanyaan terstruktur tertutup memuat nilai yang akan di skor. Untuk mendapatkan skor dari semua jawaban responden, setiap pertanyaan memuat 4 (empat) alternatif jawaban berurutan dan berjenjang yaitu dengan skala yang ordinal dari jawaban terbaik hingga terburuk. Berikut ini, pilihan jawaban diberi skor tertentu, yaitu :

- Jawaban A diberi skor 4
- Jawaban B diberi skor 3
- Jawaban C diberi skor 2
- Jawaban D diberi skor 1

Dan masing-masing jawaban dengan suatu kriteria :

1. Kategori jawaban sangat baik diberikan skor 4 (empat).
2. Kategori jawaban baik diberikan skor 3 (tiga).
3. Kategori jawaban kurang baik diberikan skor 2 (dua).
4. Kategori jawaban yang tidak baik diberikan skor 1 (satu).

Jika, pertanyaan dibalik maka jawabanya dibuat terbalik juga dan skor mengikutinya.

Kategori jawaban dapat berubah sesuai dengan kebutuhan, misal (selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah) dan seterusnya.

Tabel III. 1
 SAMPLING FRAME
 DAFTAR SELURUH PEDAGANG DI CABANG JOHAR
 DINAS PASAR KOTA SEMARANG TAHUN 2004

No	Nama Pasar	KIOS	LOS	DSR	Jumlah
1	Johar Utara	297	265	394	956
2	Johar Tengah	345	271	245	861
3	Johar Selatan	178	512	93	783
4	Kanjengan/SCJ	-	136	450	586
5	Ya'ik Permai	130	139	421	690
6	Ya'ik Baru	58	289	193	540
Jumlah		1008	1612	1796	4416

3. Sampling fraction

Adalah pemecahan unsur-unsur atau bagian-bagian sampel menjadi bagian yang lebih kecil. Dalam sampling frame ini sampel yang akan di ambil adalah pedagang yang menempati kios di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang.. Alasan yang mendasarinya dengan mengambil kios karena kios merupakan bangunan pasar yang didalamnya terdiri dari bangunan dalam pasar yang memiliki syarat yang lebih lengkap yang dapat dilihat pada tabel III. 2, berikut:

Tabel III. 2
 SAMPLING FRAME
 PEDAGANG DI CABANG JOHAR
 DINAS PASAR KOTA SEMARANG

No	Nama Pasar	Jumlah Kios
1	Johar Utara	297
2	Johar Tengah	345
3	Johar Selatan	178
4	Ya'ik Permai	130
5	Yai'k Baru	58
Jumlah		1008

4. Sampling size

Sampling size adalah prosentase besarnya sampel yang akan diambil, bisa dinyatakan dalam prosentase dahulu, baru dihitung besar riilnya berapa. Berdasarkan pendapat dari beberapa peneliti menyatakan besarnya sampel tidak boleh kurang dari 10 % tetapi ada pula yang menyatakan sampel minimal 5 % dari jumlah populasi. **Sutrisno Hadi (Singarimbun, 1989: 3)** menyatakan bahwa:

Tidak ada ukuran yang baku dalam menentukan besarnya jumlah sampel. Dikatakan bahwa semakin besar sampel di ambil maka semakin kecil pula kesalahan terhadap nilai populasi yang diperoleh. Sehingga sampel yang besar cenderung memberi praduga yang lebih mendekati nilai sesungguhnya.

Berdasarkan pendapat di atas tersebut, maka sampling sizenya dapat dilihat pada tabel III. 3 dibawah:

Tabel III. 3
 SAMPLING SIZE PEDAGANG
 DI CABANG JOHAR DINAS PASAR KOTA SEMARANG

No	Nama Pasar	Jumlah Pedagang	Persentase 5 %	Hasil
1	Johar Utara	297	14,8	15
2	Johar Tengah	345	17,25	17
3	Johar Selatan	178	8,9	9
4	Ya'ik Permai	130	6,5	6
5	Ya'ik Baru	58	2,9	3
Jumlah		1008	50,35	50

Berdasarkan hasil perhitungan dari sampling size yang penulis kemukakan di atas, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 pedagang yang menempati kios di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang.

c. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel, sebagai berikut:

- a. Sampel Purposif adalah pengambilan sampel pada karakteristik tertentu dari subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini sampel purposif digunakan pada saat peneliti mengambil fraction dari frame yang ditabelkan. Dari seluruh *frame sampling* pedagang yang menempati Kios, Los dan Dasaran, peneliti mengambil *fraction sampling* pedagang yang menempati Kios dengan alasan Kios merupakan bangunan

pasar yang lebih lengkap fasilitasnya dibandingkan dengan Los dan dasaran.

- b. Proposional Random Sampling, adalah pengambilan sampel secara acak dengan didasarkan pada perimbangan tertentu. Teknik sampling ini digunakan untuk menghitung besarnya sampel yang akan diteliti yaitu menghitung besarnya tiap *fraction* dikalikan dengan 5 %.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kuesioner (daftar pertanyaan)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dalam penelitian ini questioner diberikan kepada pedagang sebagai responden penelitian untuk pembuatan laporan penelitian.

- b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam teknik ini peneliti melakukan wawancara ke Dinas Pasar Kota Semarang dan Cabang Pasar Johar serta dengan pedagang untuk mendapatkan data awal penelitian.

c. Observasi (pengamatan)

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap obyek penelitian agar diperoleh data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam teknik ini peneliti melakukan observasi ke lapangan yaitu di Cabang Pasar Johar Dinas Pasar Kota Semarang.

d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku dan catatan lainnya yang ada relevansi dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mencari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

I. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis secara kuantitatif yaitu analisa data yang digunakan untuk menganalisa data yang berupa angka-angka dalam persentase. Artinya, analisis ini untuk mengetahui secara statistik hubungandan pengaruh antara variabel bebas dan terikat, sehingga selanjutnya digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis berdasarkan hasil dari jawaban kuesioner responden penelitian .

J. Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan adanya hubungan antar variabel karena menggunakan skala ordinal maka dipakai rumus-rumus pengujian hipotesis sebagai berikut sebagai berikut :

a. Koefisien Korelasi Rank Kendall

Koefisien ini digunakan untuk menguji hipotesis minor, yaitu tingkat asosiasi atau hubungan antara variabel X_1 dengan Y atau X_2 dengan Y dan X_3 dengan Y , adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\tau = \frac{S}{\frac{1}{2}N(N-1)}$$

Dimana:

τ = Koefisien korelasi Rank Kendall

S = Skor

N = Jumlah responden

Apabila terdapat ranking yang sama atau kembar pada observasi skor variabel X dan Y , akan berakibat mengubah pembagi pada rumus di atas sehingga rumus Rank Kendall menjadi:

$$\tau = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2}N(N-1) - T_x} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}N(N-1) - T_y}}$$

Dimana:

τ = Koefisien korelasi Rank Kendall

S = Skor

N = Banyaknya obyek atau individu yang diurutkan pada X dan Y

$T_x = \frac{1}{2} \sum t(t-1)$, t adalah banyaknya observasi berangka sama dalam tiap kelompok angka sama pada variabel X

$T_y = \frac{1}{2} \sum t(t-1)$, t adalah banyaknya observasi berangka sama dalam tiap kelompok angka sama pada variabel Y

Karena N lebih besar dari 10 angka, dapat dianggap berdistribusi normal oleh sebab itu dalam pengujian signifikansinya harga koefisien korelasi rank Kendall di atas terlebih dahulu didistribusikan ke dalam rumus berdistribusi berikut:

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

Kemudian harga Z dikonsultasikan dengan tabel untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara dua variabel tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila $Z_0 > Z_t$ pada taraf signifikansi 1% berarti sangat signifikan, hipotesis diterima.
2. Apabila $Z_0 > Z_t$ pada taraf signifikansi 5% berarti signifikan, hipotesis diterima.
3. Apabila $Z_0 < Z_t$ pada taraf signifikansi 5% berarti tidak signifikan, hipotesis ditolak.

b. Koefisien Konkordansi Kendall (W)

Koefisien ini digunakan untuk mengukur derajat asosiasi antara variabel X_1 , dan X_2 dengan Y secara bersama-sama melalui pengukuran terhadap himpunan-himpunan ranking masing-masing variabel yang diasosiasikan secara bersama-sama. Untuk menghitung harga W adalah dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$W = \frac{S}{\frac{1}{12} k^2 (N^3 - N) - k \Sigma T}$$

Dimana:

$$T = \frac{\Sigma(t^3 - t)}{12}$$

Keterangan:

- W = Koefisien Konkordansi Rank Kendall
- S = Hasil Observasi ranking tiap variabel
- k = Banyaknya himpunan ranking perjenjang
- N = Banyaknya obyek atau individu yang diberi ranking
- T = Jumlah harga-harga T untuk semua ranking
- t = Banyaknya observasi dalam suatu kelompok yang memperoleh angka sama untuk suatu ranking tertentu.

Untuk signifikansinya dipergunakan rumus:

$$X^2 = k (N-1) W$$

Dimana:

$$X^2 = \text{test chi square}$$

k = Banyaknya himpunan ranking perjenjangan

N = Banyaknya obyek atau individu yang diberi ranking

W = Koefisien Konkordansi Rank Kendall

Kemudian hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan harga kritis chi kuadrat dengan rumus $df = N-1$ adapun ketentuannya sebagai berikut:

1. Apabila $X_0^2 > X_1^2$ pada taraf signifikansi 1% berarti sangat signifikan, hipotesis diterima.
2. Apabila $X_0^2 > X_1^2$ pada taraf signifikansi 5% berarti signifikan, hipotesis diterima.
3. Apabila $X_0^2 < X_1^2$ pada taraf signifikansi 5% berarti tidak signifikan, hipotesis ditolak.

c. Koefisien Determinan

Digunakan untuk mengetahui berapa persen (%) pengaruh masing-masing variabel X ke variabel Y dan pengaruh variabel X1, X2 dan X3 secara bersama-sama ke variabel Y.

Digunakan rumus :

○ $KD_{XY} = (\tau_{XY})^2 \cdot 100\%$

○ $KD_{X_1 X_2 X_3, Y} = (W)^2 \cdot 100\%$

Dimana : KD = Koefisien Determinan

BAB IV

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab ini akan disajikan data yang diperoleh oleh peneliti yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Unit analisis dari penelitian ini adalah para pedagang yang menempati kios di cabang Johar dinas Pasar Kota Semarang. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 50 orang pedagang. Data yang disajikan ini akan dijadikan sebagai bahan analisis data dan pengujian hipotesis pada bab selanjutnya.

Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang meliputi data mengenai identitas responden, implementasi kebijakan, isi kebijakan dan sikap.

A. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Cabang Dinas Pasar Wilayah I Johar merupakan salah satu diantara enam cabang dinas Pasar Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan SK Walikota Semarang No: 061. 1/ 278 Tahun 2001.

Pasar Johar adalah aset milik Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan total luas lahan sebesar 33. 213, 25 m² yang terdiri atas:

- Pasar Johar (bangunan induk) luasnya 16. 380, 75 m².
- Pasar Ya'ik baru luasnya 5. 027, 5 m².
- Pasar ya'ik Permai luasnya 8. 820m².
- Pasar kanjengan/ Pungkuran luasnya 2985 m².

Pasar ini mulai dibangun pada tahun 1936, dan mulai difungsikan secara operasional sejak tahun 1939. Pasar yang terletak di Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan kauman, Kecamatan Semarang Tengah ini terbagi dalam beberapa lokasi yaitu Johar Utara, Johar Tengah, Johar Selatan, Ya'ik Permai, Yaik Baru, Kanjengan/ Pungkuran.

Sarana dan prasarana yang dimiliki berupa:

- Gedung bangunan Pasar
- Air dan listrik dengan besarnya daya listrik terpasang 187. 500 watt.
- Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dengan luas 50 m2, volume sampah perhari 90 m3.
- Pengelolaan kebersihan Pasar oleh Pusat Koperasi Pasar (Puskoppas).
- Parkir dikelola Dinas Perhubungan.
- Sumur Bor dan sumur hydrant berjumlah 8 buah.

Jumlah pedagang mencapai 4416 orang, yang terdiri dari:

- Pasar Johar (bangunan induk): 2600 orang
- Pasar Ya'ik baru 540 orang.
- Pasar Ya'ik Permai 690 orang.
- Pasar Kanjengan/ Pungkuran 586 orang.

Pasar Wilayah I Johar dalam usaha mencapai tujuan didasarkan pada visi dan misinya dari Dinas Pasar Kota Semarang, yaitu "*Terwujudnya Pasar sebagai Kebanggaan Kota Semarang*". Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka Cabang Dinas Pasar wilayah I Johar Kota Semarang mengemban misi Dinas Pasar Kota Semarang, adalah:

- ❖ Mewujudkan pasar-pasar yang nyaman, aman, sesuai tuntutan masyarakat
- ❖ Mewujudkan kemandirian pengelolaan pasar
- ❖ Mewujudkan Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Pasar yang memadai sebagai dana pembangunan daerah.

Kemudian mengenai susunan struktur organisasi terdiri dari:

1. Kepala Cabang: Sugiman Haryono
2. Koordinator administrasi: Suwarni, SH
3. Pembantu Bendahara: Kemis, SH
4. Koordinator Operasional, meliputi:
 - Kepala Pasar Johar: Tumin
 - Kepala Pasar Johar Tengah: Ngasiman, SH.
 - Kepala Pasar Johar selatan, Kanjengan/ Pungkuran: Waspodo.
 - Kepala pasar Ya'ik Permai: Abdullah.
 - Kepala Pasar Ya'ik Baru: Yudhi Winarso.
5. Staf Cabang berjumlah 5 orang.
6. Juru pungut sebanyak 28 orang.
7. Keamanan dan ketertiban berjumlah 20 orang.
8. Keamanan jaga malam berjumlah 14 orang.
9. Teknisi listrik berjumlah 4 orang.
10. Tenaga pembersih (Puskoppas) berjumlah 39 orang.

B. HASIL PENELITIAN

B. 1. Identitas Responden

Data identitas responden disajikan untuk mengetahui keterangan yang ada pada objek penelitian. Identitas responden dilakukan dengan membagi responden ke dalam kategori usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lokasi berjualan dan jenis dagangan. Secara lebih jelas, identitas responden dapat dilihat dalam tabel-tabel yang ada di bawah ini :

Tabel IV.1
USIA RESPONDEN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
21-30	7	14
31-40	15	30
41-50	18	36
51 keatas	10	20
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan identitas responden

Dari tabel IV.1 dapat dilihat bahwa dari 50 responden mayoritas responden (36 %) berusia antara 41-50 tahun, sedangkan responden dengan prosentase terkecil (14 %) berusia antara 21-30 tahun. Kemudian lainnya berusia 31- 40 tahun (30 %) dan berusia 51 tahun keatas (20 %).

Menyangkut identitas responden mayoritas berada pada usia menuju taraf kematangan dalam bekerja dan lainnya menunjukkan bahwa usia mereka berada pada masa puncak usia produktif dalam bekerja.

Tabel IV.2
JENIS KELAMIN RESPONDEN

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	29	58
Perempuan	21	42
Jumlah	50	42

Sumber : Diolah dari pertanyaan identitas responden

Dari tabel IV 2 dapat dilihat bahwa dari 50 responden mayoritas responden (58%) berdasarkan jenis kelaminnya, berjenis kelamin laki-laki, sedangkan lanaya (42%) berjenis kelamin perempuan.

Jenis kelamin seorang responden sedikit banyak menentukan, untuk responden yang berjenis kelamin laki-laki responden biasanya cenderung didominasi dengan logikanya sehingga ia akan menilai suatu kebijakan lebih mengutamakan rasionalitasnya. Berbeda dengan responden yang berjenis kelamin perempuan, mereka cenderung mengutamakan perasaanya sehingga akan menilai suatu kebijakan kurang mengutamakan rasionalitasnya. Jadi dari hal di atas dapat dikemukakan bahwa penilaian responden terhadap Perda Pasar dan implementasinya cenderung rasional hal ini penting dilakukan dalam menilai suatu kebijakan.

Tabel IV.3
PENDIDIKAN TERAKHIR RESPONDEN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tidak Tamat SD	5	10
Tamat SD	11	22
Tamat SMP	21	42
Tamat SMA	9	18
Tamat Perguruan Tinggi	4	8
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan identitas responden

Pada tabel IV. 3 dapat dilihat bahwa sebanyak 50 responden sebagian besar responden berpendidikan tamat SMP (42 %) dan ada pula responden yang tamat perguruan tinggi dengan prosentase terkecil (8 %). Responden secara akumulatif yang mempunyai tingkat kemampuan yang cukup memadai jika dilihat dari sisi pendidikannya (68 %) meliputi tamat SMP, tamat SMA dan tamat perguruan tinggi. Berarti pemahaman para pedagang terhadap Perda Pengaturan Pasar tidak diragukan.

Tabel IV. 4
LOKASI BERJUALAN

Lokasi Berjualan	Frekuensi	Persentase
Johar Utara	15	30
Johar Tengah	17	34
Johar Selatan	9	18
Ya'ik Permai	6	12
Ya'ik baru	3	6
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan identitas responden

Tabel IV.4 menunjukkan bahwa dari 50 responden mayoritas responden menempati lokasi di Johar Tengah (34 %), sedangkan yang terkecil (6 %) menempati lokasi di Ya'ik Baru. Kemudian lainnya menempati lokasi di Johar Utara (30 %), Johar Selatan (18 %) dan Ya' ik Permai (12 %).

Tabel IV.4
JENIS DAGANGAN

Jenis Dagangan	Frekuensi	Persentase
Kelontong	13	26
Buah	11	22
Sayuran	8	16
Pakaian	12	24
lainya	6	12
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan identitas responden

Tabel IV.5 menunjukkan dari 50 responden mayoritas responden (26 %) jenis dagangannya kelontong, sedangkan yang terkecil (12%) lainnya. Kemudian lainnya pakaian (24%), buah (22%), dan sayuran (16%).

B. 2. Implementasi Kebijakan (Y)

Implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan yang berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan tersebut untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Disini akan disajikan data dari masing-masing indikator implementasi kebijakan dari hasil pengisian.

Tabel IV. 6
PENGETAHUAN PEDAGANG TENTANG PERDA

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Mengetahui	50	100
Tidak mengetahui	-	-
Jumlah	50	100

Sumber: Diolah dari pertanyaan no. 1

Dari tabel IV. 6 dapat dilihat bahwa semua pedagang (100%) mengetahui adanya Perda Pengaturan Pasar di Kota Semarang.

Tabel.IV. 7
 PENGUASAAN INFORMASI KEBIJAKAN APARAT
 TENTANG PENGATURAN PASAR

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat menguasai	-	-
Menguasai	12	24
Kurang menguasai	31	62
Tidak menguasai	7	14
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.2

Dari tabel IV. 7 dapat dilihat bahwa berkaitan dengan penguasaan informasi kebijakan aparat tentang pengaturan pasar dari 50 responden mayoritas responden 31 (62 %) menjawab kurang menguasai, sedangkan lainnya menjawab menguasai 12 (24%) dan 7 (14%) menjawab tidak menguasai.

Tabel IV. 8
 PEMAHAMAN PEDAGANG
 TENTANG PERDA PENGATURAN PASAR

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat paham	3	6
Paham	15	30
Kurang paham	24	48
Tidak paham	8	16
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.3

Tabel IV. 8 menunjukkan bahwa dilihat dari pemahaman pedagang tentang perda pengaturan pasar dari 50 responden mayoritas responden 24 (48 %) menjawab kurang paham, sedangkan lainnya 15 (30 %) menjawab cukup paham, 8 (16 %) menjawab tidak paham dan 3 (6 %) menjawab paham.

Tabel. IV. 9
PROSES PERIJINAN UNTUK BERDAGANG

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat lancar	1	2
Lancar	17	34
Kurang lancar	26	52
Tidak lancar	6	12
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.4

Tabel IV. 9 menunjukkan bahwa dilihat dari proses perijinan untuk berdagang dari 50 responden sebagian besar 26 (52 %) menjawab kurang lancar. Kemudian lainnya 17 (34 %) menjawab lancar, 6 (12 %) menjawab tidak lancar dan 1 (2 %) menjawab sangat lancar.

Tabel.IV. 10
FASILITAS PELAYANAN KEBIJAKAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat memadai	1	2
Memadai	13	26
Kurang memadai	31	62
Tidak memadai	5	10
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.5

Dari tabel IV. 10 di atas dapat dijelaskan dilihat dari fasilitas pelayanan kebijakan. Dari 50 responden sebagian besar 31 (62 %) menjawab kurang memadai. Kemudian lainnya 13 (26 %) menjawab memadai, 5 (10 %) menjawab tidak memadai dan 1 (2 %) menjawab sangat memadai.

Tabel IV. 11
KESESUAIAN TARIF RETRIBUSI
DIBEBANKAN KEPADA PEDAGANG

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat sesuai	1	2
Sesuai	7	14
Kurang sesuai	35	70
Tidak sesuai	7	14
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.6

Tabel IV. 11 menunjukkan bahwa dilihat dari kesesuaian tarif retribusi dibebankan kepada pedagang, dari 50 responden sebagian besar 35 (70 %) menjawab kurang sesuai. Kemudian lainnya masing-masing 7 (14 %) menjawab sesuai dan tidak sesuai serta 1 (2 %) menjawab sangat sesuai.

Tabel IV. 12
MANFAAT KEBIJAKAN PENGATURAN PASAR

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat bermanfaat	1	2
Bermanfaat	6	12
Kurang bermanfaat	39	72
Tidak bermanfaat	4	8
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 7

Dari tabel IV. 12 di atas menunjukkan dilihat dari manfaat kebijakan bagi pedagang, dari 50 responden sebagian besar 39 (72 %) menjawab kurang bermanfaat. Kemudian lainnya 6 (12 %) menjawab bermanfaat, 4 (8 %) menjawab tidak bermanfaat dan 1 (2 %) menjawab sangat bermanfaat.

Tabel IV. 13
PEDAGANG MENJAGA KEBERSIHAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat sesuai	2	4
Sesuai	14	28
Kurang sesuai	30	60
Tidak sesuai	4	8
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 8

Tabel IV. 13 menunjukkan dilihat dari perilaku pedagang dalam menjaga kebersihan tempat berdagang sesuai dengan aturan aparat petugas pasar, dari 50 responden sebagian besar 30 (60 %) menjawab kurang sesuai. Kemudian lainnya 14 (28 %) menjawab sesuai, 4 (8 %) menjawab tidak sesuai dan 2 (4 %) menjawab sangat sesuai.

Tabel IV. 14
MOTIVASI PEDAGANG

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat termotivsi	1	2
Termotivasi	10	20
Kurang termotivsi	36	72
Tidak termotivsi	3	6
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 9

Dari tabel IV. 14 di atas menunjukkan dilihat dari motivasi pedagang dalam mendukung dan ikut serta mensukseskan perda No. 10 tahun 2000, dari 50 responden sebagian besar 36 (72 %) menjawab kurang termotivasi. Kemudian lainnya 10 (20 %) menjawab termotivasi, 3 (6 %) menjawab tidak termotivasi dan 1 (2 %) menjawab sangat termotivasi.

Tabel IV. 15
 FASILITAS YANG DITERIMA PEDAGANG

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat meningkat	2	4
Meningkat	13	26
Kurang meningkat	31	62
Tidak meningkat	4	8
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 10

Dari tabel IV. 15 di atas menunjukkan dilihat dari fasilitas yang diterima pedagang, dari 50 responden sebagian besar 31 (62%) menjawab kurang meningkat. Kemudian lainnya 13 (26%) menjawab meningkat, 4 (8%) menjawab tidak meningkat dan 2 (4%) sangat meningkat.

Untuk mengelompokkan nilai-nilai total hasil penjumlahan dari jawaban kuesioner yang berkaitan dengan variabel Implementasi Kebijakan maka akan digunakan rumus sebagai berikut :

$$i = R/k$$

Keterangan :

i = Interval kelas

R= Range (jarak), merupakan hasil skor tertinggi dikurangi skor terendah

k = Jumlah kelas

Dari rumus diatas maka didapat $i = 23-16/ 4 = 9/ 4 = 1, 75$, maka berdasarkan hasil perhitungan di atas $i = 1, 75$. Pengelompokan skor tabel untuk variabel implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 16
**KLASIFIKASI SKOR VARIABEL
 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**

Kategori Jawaban	Notasi	Kelas Interval
Tinggi	T	21, 28-23, 03
Cukup tinggi	CT	19, 51-21, 27
Kurang tinggi	KT	17, 76-19, 51
Rendah	R	16-17, 75

Sumber: Diolah dari pertanyaan no. 2-10

Klasifikasi skor variabel menunjukkan pengertian sebagai berikut:

1. Kategori jawaban, menunjukkan penilaian apakah implementasi Perda No. 10 Tentang Pengaturan Pasar sudah berhasil, cukup berhasil, kurang berhasil serta tidak berhasil.
2. Notasi, menunjukkan simbol dari kategori jawaban
3. Interval, menunjukkan total nilai atas jawaban dari masing-masing responden berada pada angka berapa dan kategori jawaban yang mana.

Setelah dilakukan pengklasifikasian skor dari variabel implementasi maka hasil pengklasifikasian tersebut, dimasukkan kedalam rekapitulasi penilaian untuk menunjukkan seberapa berhasil implementasi Perda Pengaturan Pasar. Dalam rangka mengetahui hal tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV. 17
 REKAPITULASI PENILAIAN
 VARIABEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Berhasil	6	12
Cukup berhasil	17	28
Kurang berhasil	23	46
Rendah	6	12
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.1-10

Dari tabel IV. 17 rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa implementasi perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar masih kurang berhasil “(46 %)” dan rendah “(12 %)”. Namun demikian, implementasi perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar masih menunjukkan cukup berhasil “28 %” dan berhasil.

B. 3. Tingkat Komunikasi (X1)

Tingkat komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan berita atau info dari seseorang kepada orang lain untuk menginterpretasikan suatu ide dalam suatu cara yang diinginkan oleh komunikator. Di bawah ini akan disajikan data dari masing-masing indikator isi kebijakan dari hasil pengisian kuesioner.

Tabel IV.18
PENGARAHAN APARAT PETUGAS PASAR DALAM SATU MINGGU

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
3 kali	3	6
2 kali	17	34
1 kali	27	54
Tidak pernah	3	6
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 12

Dari tabel IV. 18 di atas menunjukkan dilihat dari pengarahan kepada pedagang yang dilakukan aparat petugas pasar dalam satu minggu, dari 50 responden sebagian besar 27 (54 %) menjawab 1 kali. Kemudian lainnya 17 (34 %) menjawab 2 kali serta masing-masing 3 (6 %) menjawab tidak pernah dan 3 kali.

Tabel IV.19
LANCARNYA INFORMASI KEBIJAKAN PENGATURAN PASAR

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat lancar	3	6
Lancar	17	34
Kurang lancar	26	52
Tidak lancar	4	8
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.13

Tabel IV. 19 di atas, menunjukkan dilihat dari lancarnya informasi kebijakan pengaturan pasar dari 50 responden sebagian besar 26 (52 %) menjawab kurang lancar. Kemudian lainnya 17 (34 %) menjawab lancar, 4 (8 %) menjawab tidak lancar dan 3 (6 %) menjawab sangat lancar.

Tabel IV. 20
 PENGGUNAAN BAHASA
 YANG MUDAH DIPAHAMI PEDAGANG

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat mudah	1	2
Mudah	17	34
Kurang mudah	29	58
Tidak mudah	3	6
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.14

Tabel IV. 20 di atas menunjukkan dilihat dari penggunaan bahasa yang mudah dipahami pedagang, dari 50 responden sebagian besar 29 (50 %) menjawab kurang mudah. Kemudian lainnya 17 (34 %) menjawab mudah, 3 (6%) menjawab tidak mudah dan 1 (2 %) menjawab sangat mudah.

Tabel IV. 21
 TERPERINCINYA INFORMASI
 KEBIJAKAN TENTANG PENGATURAN PASAR

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat terperinci	2	4
Terperinci	19	38
Kurang terperinci	26	52
Tidak terperinci	3	6
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.15

Tabel IV. 21 di atas menunjukkan dilihat dari terperinci informasi kebijakan pengaturan pasar, dari 50 responden sebagian besar 26 (52 %) menjawab kurang terperinci.

menjawab kurang terperinci. Kemudian lainnya 19 (38 %) menjawab terperinci, 3 (6 %) menjawab tidak terperinci dan 2 (4 %) menjawab sangat terperinci.

Tabel IV. 22
JELASNYA INFORMASI
KEBIJAKAN TENTANG PENGATURAN PASAR

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat jelas	0	0
Jelas	18	36
Kurang jelas	31	62
Tidak jelas	1	2
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.16

Tabel IV. 22 di atas menunjukkan dilihat dari jelasnya informasi kebijakan pengaturan pasar, dari 50 responden sebagian besar 31 (62 %) menjawab kurang jelas. Kemudian lainnya 18 (36 %) menjawab jelas dan 1 (2 %) menjawab tidak jelas.

Tabel IV.23
MEDIA INFORMASI YANG DIGUNAKAN
MEMPERJELAS INFORMASI YANG DITERIMA

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat memperjelas	0	0
Memperjelas	20	40
Kurang memperjelas	26	52
Tidak memperjelas	4	8
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.17

Tabel IV. 23 di atas menunjukkan dilihat dari media informasi yang digunakan dalam menyampaikan informasi kebijakan tentang pengaturan pasar memperjelas informasi yang diterima, dari 50 responden sebagian besar 26 (52 %) menjawab kurang memperjelas. Kemudian lainnya 20 (40 %) menjawab memperjelas dan 4 (8 %) menjawab tidak memperjelas.

Tabel IV. 24
**SESUAINYA INFORMASI YANG DITERIMA PEDAGANG DENGAN
 INFORMASI KEBIJAKAN YANG TERTERA DALAM
 KEBIJAKAN TENTANG PENGATURAN PASAR**

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat sesuai	0	0
Sesuai	17	34
Kurang sesuai	32	62
Tidak sesuai	1	2
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 18

Tabel IV. 24 di atas menunjukkan dilihat dari informasi kebijakan yang diterima pedagang dengan informasi kebijakan yang tertera dalam kebijakan pengaturan pasar, dari 50 responden sebagian besar 32 (64 %) menjawab kurang sesuai. Kemudian lainnya 17 (34 %) menjawab sesuai dan 1 (2 %) menjawab tidak sesuai.

Tabel IV. 25
**SESUAINYA INFORMASI
 YANG DITERIMA PEDAGANG DENGAN
 YANG DISAMPAIKAN APARAT PETUGAS PASAR**

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat sesuai	3	6
Sesuai	20	40
Kurang sesuai	24	48
Tidak sesuai	3	6
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 19

Tabel IV. 25 di atas menunjukkan dilihat dari informasi kebijakan yang diterima pedagang dengan yang disampaikan aparat petugas pasar, dari 50 responden sebagian besar 24 (48 %) menjawab kurang sesuai. Kemudian lainnya 20 (40 %) menjawab sesuai serta masing-masing 3 (6 %) menjawab tidak sesuai dan sangat sesuai.

Untuk mengelompokkan nilai-nilai total hasil penjumlahan dari jawaban kuesioner yang berkaitan dengan variabel tingkat komunikasi maka akan digunakan rumus sebagai berikut :

$$i = R/k$$

Keterangan :

i = Interval kelas

R = Range (jarak), merupakan hasil skor tertinggi dikurangi skor terendah

k = Jumlah kelas

Dari rumus diatas maka didapat $i = 22-16/ 4 = 6/ 4 = 1, 5$, maka $i = 1, 5$. Pengelompokan skor tabel untuk variabel tingkat komunikasi adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 26
KLASIFIKASI SKOR VARIABEL TINGKAT KOMUNIKASI

Kategori Jawaban	Notasi	Kelas Interval
Tinggi	T	20, 53-22, 03
Cukup tinggi	CT	19, 02-20, 52
Kurang tinggi	KT	17, 51-19, 01
Rendah	R	16-17, 50

Klasifikasi skor variabel menunjukkan pengertian sebagai berikut:

1. Kategori jawaban, menunjukkan penilaian apakah tingkat komunikasi yang terjadi dalam implementasi Perda No. 10 Tentang Pengaturan Pasar sudah mendukung, cukup mendukung, kurang mendukung serta tidak mendukung.
2. Notasi, menunjukkan simbol dari kategori jawaban
3. Interval, menunjukkan total nilai atas jawaban dari masing-masing responden berada pada angka berapa dan kategori jawaban yang mana.

Setelah dilakukan pengklasifikasian skor dari variabel tingkat komunikasi maka hasil pengklasifikasian tersebut, dimasukkan kedalam rekapitulasi penilaian untuk menunjukkan seberapa berhasil implementasi Perda Pengaturan Pasar. Dalam rangka mengetahui hal tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV. 27
REKAPITULASI PENILAIAN
VARIABEL TINGKAT KOMUNIKASI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	3	6
Cukup tinggi	14	28
Kurang tinggi	26	52
Rendah	7	14
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.12-19

Dari tabel IV. 27 rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa tingkat komunikasi yang disampaikan aparat dalam mendukung implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar masih kurang tinggi “52 %” dan rendah “14 %”. Namun demikian bahwa tingkat komunikasi yang disampaikan aparat dalam mendukung implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar masih cukup tinggi tinggi “28 %” dan tinggi “6 %”.

B. 4. Sumber Daya (X2)

Sumber daya, adalah sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya non manusia.

Di bawah ini akan disajikan data dari masing-masing indikator tingkat komunikasi dari hasil pengisian kuesioner.

Tabel IV. 28
KEMAMPUAN APARAT PETUGAS PASAR
DALAM MENJALIN KERJASAMA DENGAN PEDAGANG

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	1	2
Baik	8	16
Kurang baik	28	56
Tidak baik	13	26
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 20

Tabel IV. 28 di atas menunjukkan dilihat dari kemampuan aparat petugas pasar dalam menjalin kerjasama dengan pedagang, dari 50 responden sebagian besar 28 (56 %) menjawab kurang baik. Kemudian lainnya 13 (26 %) menjawab tidak baik, 8 (16 %) menjawab baik dan 1 (2 %) menjawab sangat baik.

Tabel IV. 29
KEMAMPUAN APARAT DALAM MELAKUKAN PENDEKATAN
PERSONAL UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	0	0
Baik	6	12
Kurang baik	33	66
Tidak baik	11	22
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 21

Tabel IV. 29 di atas menunjukkan dilihat dari kemampuan aparat petugas pasar dalam melakukan pendekatan personal kepada pedagang untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar pedagang, dari 50 responden sebagian besar 33 (66 %) menjawab kurang baik. Kemudian lainnya 11 (22 %) menjawab tidak baik, serta 6 (12 %) menjawab baik.

Tabel IV. 30
KEMAMPUAN APARAT DALAM
MELAKUKAN IDE-IDE PEMBAHARUAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	2	4
Baik	10	36
Kurang baik	27	54
Tidak baik	11	6
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 22

Tabel IV. 30 di atas menunjukkan dilihat dari baiknya kemampuan aparat petugas pasar dalam ide-ide pembaharuan dalam pengaturan pasar, dari 50 responden sebagian besar 27 (56 %) menjawab kurang baik. Kemudian lainnya 11 (22 %) menjawab tidak baik, 10 (16 %) menjawab baik dan 2 (2 %) menjawab sangat baik.

Tabel IV. 31
KEMAMPUAN APARAT DALAM MENJALANKAN
RENCANA-RENCANA KEBIJAKAN PENGATURAN PASAR

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	1	2
Baik	9	18
Kurang baik	33	66
Tidak baik	7	14
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 23

Tabel IV. 31 di atas menunjukkan dilihat dari kemampuan aparat petugas pasar dalam menjalankan rencana-rencana kebijakan pengaturan pasar, dari 50 responden sebagian besar 33 (66 %) menjawab kurang baik. Kemudian lainnya 9 (18 %) menjawab baik, 7 (14 %) menjawab kurang baik dan 1 (2 %) menjawab sangat baik.

Tabel.IV. 32
KEMAMPUAN APARAT DALAM MEMBERIKAN
PEMAHAMAN PROSEDUR-PROSEDUR PELAYANAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	1	2
Baik	5	10
Kurang baik	35	70
Tidak baik	9	18
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 24

Tabel IV. 32 di atas menunjukkan dilihat dari kemampuan aparat petugas pasar dalam memberikan pemahaman terhadap prosedur-prosedur pelayanan, dari 50 responden sebagian besar 35 (70 %) menjawab kurang baik. Kemudian lainnya 9 (18 %) menjawab tidak baik, 5 (16 %) menjawab baik dan 1 (2 %) menjawab sangat baik.

Tabel IV. 33
FASILITAS BANGUNAN PASAR

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat memadai	1	2
Memadai	10	20
Kurang memadai	33	66
Tidak memadai	6	12
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 25

Tabel IV. 33 di atas menunjukkan dilihat dari fasilitas bangunan pasar, dari 50 responden sebagian besar 33 (66 %) menjawab kurang memadai.

Kemudian lainnya 10 (20 %) menjawab memadai, 6 (16 %) menjawab tidak memadai dan 1 (2 %) menjawab sangat memadai.

Tabel IV. 34
FASILITAS KEAMANAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	0	0
Baik	6	12
Kurang baik	36	62
Tidak baik	8	16
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 26

Tabel IV. 34 di atas menunjukkan dilihat dari fasilitas keamanan, dari 50 responden sebagian besar 36 (56 %) menjawab kurang baik. Kemudian lainnya 8 (16 %) menjawab tidak baik, serta 6 (12 %) menjawab baik.

Tabel IV. 35
FASILITAS PENERANGAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat memadai	1	2
Memadai	12	24
Kurang memadai	26	52
Tidak memadai	11	22
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 27

Tabel IV. 35 di atas menunjukkan dilihat dari fasilitas penerangan, dari 50 responden sebagian besar 26 (52 %) menjawab kurang memadai. Kemudian lainnya 12 (24 %) menjawab memadai, 11 (22 %) menjawab tidak memadai dan 1 (2 %) menjawab sangat memadai.

Tabel IV. 36
FASILITAS MCK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase
Sangat memadai	2	4
Memadai	11	22
Kurang memadai	25	50
Tidak memadai	12	24
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 28

Tabel IV. 36 di atas menunjukkan dilihat dari fasilitas MCK yang, dari 50 responden sebagian besar 25 (50 %) menjawab kurang memadai. Kemudian lainnya 12 (24 %) menjawab tidak memadai, 11 (22 %) menjawab memadai dan 2 (2 %) menjawab sangat memadai.

Tabel IV. 37
FASILITAS KEBERSIHAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat memadai	1	2
Memadai	11	22
Kurang memadai	30	60
Tidak memadai	8	16
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 29

Tabel IV. 37 di atas menunjukkan dilihat dari fasilitas kebersihan, dari 50 responden sebagian besar 30 (60 %) menjawab kurang memadai. Kemudian lainnya 11 (22 %) menjawab memadai, 8 (16 %) menjawab tidak memadai dan 1 (2 %) menjawab sangat memadai.

Untuk mengelompokkan nilai-nilai total hasil penjumlahan dari jawaban kuesioner yang berkaitan dengan variabel sumber daya maka akan digunakan rumus sebagai berikut :

$$i = R/k$$

Keterangan :

i = Interval kelas

R = Range (jarak), merupakan hasil skor tertinggi dikurangi skor terendah

k = Jumlah kelas

Dari rumus diatas maka didapat $i = 24-17/ 4 = 9/ 4 = 1, 75$, jadi maka $i = 1, 75$. Pengelompokan skor tabel untuk variabel sumber daya adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 38
KLASIFIKASI SKOR VARIABEL SUMBER DAYA

Kategori Jawaban	Notasi	Kelas Interval
Tinggi	T	22, 28- 24, 03
Cukup tinggi	CT	20, 52-22, 27
Kurang tinggi	KT	18, 76-20, 51
Rendah	R	17-18, 75

Klasifikasi skor variabel menunjukkan pengertian sebagai berikut:

1. Kategori jawaban, menunjukkan penilaian apakah variabel sumber daya sudah mendukung, cukup mendukung, kurang mendukung serta tidak mendukung implementasi Perda No. 10 Tentang Pengaturan Pasar.
2. Notasi, menunjukkan simbol dari kategori jawaban.
3. Interval, menunjukkan total nilai atas jawaban dari masing-masing responden berada pada angka berapa dan kategori jawaban yang mana.

Setelah dilakukan pengklasifikasian skor dari sumber daya maka hasil pengklasifikasian tersebut, dimasukkan kedalam rekapitulasi penilaian untuk menunjukkan seberapa berhasil implementasi Perda Pengaturan Pasar. Dalam rangka mengetahui hal tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV. 39
REKAPITULASI PENILAIAN
VARIABEL SUMBER DAYA

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	4	8
Cukup tinggi	17	34
Kurang tinggi	22	44
Rendah	7	14
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 20-29

Dari tabel IV. 39 rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa sumber daya dalam mendukung implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar masih kurang tinggi “44 %” dan rendah “14 %”. Namun demikian bahwa sumber daya dalam mendukung implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar masih cukup tinggi tinggi “35 %” dan tinggi “8 %”.

B. 5. Sikap Aparat Pelaksana (X3)

Sikap aparat pelaksana, adalah suatu bentuk evaluasi dan reaksi perasaan terhadap suatu obyek tertentu dari aparat pelaksana sehingga muncul suatu perasaan mendukung ataupun tidak mendukung suatu objek tertentu. Di bawah ini akan disajikan data dari masing-masing indikator sikap kerja aparat dari hasil pengisian kuesioner.

Tabel IV. 40
APARAT PETUGAS PASAR LOYAL
TERHADAP PERATURAN DALAM
MENARIK RETRIBUSI DAN PENGATURAN PASAR

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat loyal	1	2
Loyal	22	44
Kurang loyal	26	52
Tidak loyal	1	2
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 30

Tabel IV. 40 di atas menunjukkan dilihat dari aparat petugas pasar loyal terhadap peraturan dalam menarik retribusi dan pengaturan pasar, dari 50 responden sebagian besar 26 (52 %) menjawab kurang loyal. Kemudian lainnya 22 (44 %) menjawab loyal, serta masing-masing 1 (2 %) menjawab tidak loyal dan loyal.

Tabel IV. 41
PENGABDIAN PETUGAS PASAR
TERHADAP PERDA PENGATURAN PASAR

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	2	4
Baik	21	42
Kurang baik	24	48
Tidak baik	3	6
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 31

Tabel IV. 41 di atas menunjukkan dilihat dari pengabdian aparat petugas pasar terhadap Perda pengaturan pasar, dari 50 responden sebagian besar 24 (48 %) menjawab kurang baik. Kemudian lainnya 21 (42 %) menjawab baik, 3 (6 %) menjawab tidak baik dan 2 (4 %) menjawab sangat baik.

Tabel IV. 42
 APARAT BERTANGGUNG JAWAB DALAM TUGASNYA MELAKUKAN PENGATURAN PASAR

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat bertanggungjawab	2	4
Bertanggungjawab	21	42
Kurang bertanggungjawab	24	48
Tidak bertanggungjawab	2	4
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 32

Tabel IV. 42 di atas menunjukkan dilihat dari aparat petugas pasar dalam tugasnya melakukan pengaturan pasar, dari 50 responden sebagian besar 24 (48 %) menjawab kurang bertanggungjawab. Kemudian lainnya 21 (42 %) menjawab bertanggungjawab, serta masing-masing 2 (4 %) menjawab tidak bertanggungjawab dan sangat bertanggungjawab.

Tabel IV. 43
APARAT PETUGAS PASAR MENAATI KETENTUAN RETRIBUSI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat menaati	3	6
Menaati	19	38
Kurang menaati	27	54
Tidak menaati	1	2
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 33

Tabel IV. 43 di atas menunjukkan dilihat dari aparat petugas pasar menaati ketentuan retribusi, dari 50 responden sebagian besar 27 (54 %) menjawab kurang menaati Kemudian lainnya 19 (38 %) menjawab menaati, 3 (6 %) menjawab sangat menaati serta 1 (2 %) menjawab tidak menaati.

Tabel IV. 44
**PETUGAS PASAR SOPAN
DALAM MENJALANKAN TUGASNYA**

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat sopan	2	4
Sopan	21	42
Kurang sopan	24	48
Tidak sopan	3	6
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 34

Tabel IV. 44 di atas menunjukkan dilihat dari petugas pasar sopan dalam menjalankan tugasnya menarik retribusi pasar dan pengaturan pasar, dari 50 responden sebagian besar 24 (48 %) menjawab kurang sopan. Kemudian lainnya 21 (42 %) menjawab sopan, 3 (6 %) menjawab tidak sopan serta 2 (4 %) menjawab sangat sopan.

Tabel IV. 45
KEJUJURAN DALAM MEMBERIKAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat jujur	2	4
Jujur	17	34
Kurang jujur	28	56
Tidak jujur	2	4
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 35

Tabel IV. 45 di atas menunjukkan dilihat dari kejujuran dalam memberikan besarnya tarif, dari 50 responden sebagian besar 28 (56 %) menjawab kurang jujur. Kemudian lainnya 17 (34 %) menjawab jujur, serta masing-masing 2 (4 %) menjawab sangat jujur dan tidak jujur.

Tabel IV. 46
KEJUJURAN DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN PERIJINAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat jujur	2	4
Jujur	20	40
Kurang jujur	26	52
Tidak jujur	2	4
Jumlah	50	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 36

Tabel IV. 46 di atas menunjukkan dilihat dari petugas pasar jujur dalam memberikan pelayanan perijinan kepada pedagang, dari 50 responden sebagian besar 26 (52 %) menjawab kurang jujur. Kemudian lainnya 20 (40 %) menjawab jujur, serta masing-masing 2 (4 %) menjawab sangat jujur dan tidak jujur.

Untuk mengelompokkan nilai-nilai total hasil penjumlahan dari jawaban kuesioner yang berkaitan dengan variabel sikap aparat pelaksana maka akan digunakan rumus sebagai berikut :

$$i = R/k$$

Keterangan :

i = Interval kelas

R= Range (jarak), merupakan hasil skor tertinggi dikurangi skor terendah

k = Jumlah kelas

Dari rumus diatas maka didapat $i = 21-15/ 4 = 6/ 4 = 1, 5$, maka $i = 1, 5$.

5. Pengelompokan skor tabel untuk variabel sikap aparat pelaksana adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 47
KLASIFIKASI SKOR VARIABEL
SIKAP APARAT PELAKSANA

Kategori Jawaban	Notasi	Kelas Interval
Tinggi	T	19, 53-21, 03
Cukup tinggi	CT	18, 02-19, 52
Kurang tinggi	KT	16, 51-18, 01
Rendah	R	15-16, 50

Klasifikasi skor variabel menunjukkan pengertian sebagai berikut:

1. Kategori jawaban, menunjukkan penilaian apakah sikap aparat pelaksana mendukung, cukup mendukung, kurang mendukung dan tidak mendukung dalam implementasi Perda No. 10 Tentang Pengaturan Pasar.
2. Notasi, menunjukkan simbol dari kategori jawaban

3. Interval, menunjukkan total nilai atas jawaban dari masing-masing responden berada pada angka berapa dan kategori jawaban yang mana.

Setelah dilakukan pengklasifikasian skor dari variabel sikap aparat pelaksana maka hasil pengklasifikasian tersebut, dimasukkan kedalam rekapitulasi penilaian untuk menunjukkan sikap aparat pelaksana seberapa mendukung dalam implementasi Perda Pengaturan Pasar. Dalam rangka mengetahui hal tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV. 48
REKAPITULASI PENILAIAN VARIABEL
SIKAP APARAT PELAKSANA

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tinggi	3	6
Cukup tinggi	5	10
Kurang tinggi	23	46
Rendah	19	38
Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 30-36

Dari tabel IV. 48 rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa sikap aparat pelaksana dalam mendukung implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar masih kurang tinggi "46 %" dan rendah "38 %". Namun demikian bahwa sikap kerja aparat dalam mendukung implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar masih cukup tinggi tinggi "10 %" dan tinggi "6 %".

C. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini akan disajikan beberapa tabulasi silang yang akan menunjukkan hubungan diantara variabel-variabel penelitian. Analisis dalam bentuk tabulasi silang ini dimaksudkan untuk mengujikan hipotesis secara kuantitatif dengan menggunakan rumus dan teknik statistik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat variabel yaitu implementasi (Y), tingkat komunikasi (X₁), sumber daya (X₂) dan sikap aparat pelaksana (X₃). Penulis berhipotesis bahwa antara variabel masing-masing X memiliki hubungan yang terikat dengan variabel Y. Hipotesis yang diajukan penulis adalah :

1. Ada hubungan positif antara tingkat komunikasi (X₁) dengan implementasi kebijakan (Y). Artinya bila tingkat komunikasi memiliki skor yang positif maka implementasinya juga akan bernilai positif. Begitu pula sebaliknya.
2. Ada hubungan positif antara sumber daya (X₂) dengan implementasi kebijakan (Y). Semakin positif sikap yang ditunjukkan oleh sumber daya dalam mendukung kebijakan maka akan semakin positif pula hasil implementasi kebijakan tersebut.
3. Ada hubungan positif antara sikap aparat pelaksana (X₃) dengan implementasi kebijakan (Y). Semakin positif sikap aparat pelaksana dalam mendukung implementasi maka akan semakin positif pula hasil implementasi tersebut.
4. Ada hubungan yang positif antara tingkat komunikasi (X₁), sumber daya (X₂), dan sikap aparat pelaksana (X₃) dengan implementasi kebijakan (Y).

Bila ketiga variabel bebas menunjukkan kondisi positif yang mendukung keberhasilan implementasi maka dapat dipastikan implementasi kebijakan akan berhasil.

Berdasarkan data-data yang telah disajikan sebelumnya maka berikut ini akan disajikan beberapa tabel silang dengan perhitungan statistik untuk melakukan pengujian hipotesis sebagai analisis kuantitatif.

C.1. Hubungan antara variabel tingkat komunikasi (X_1) dengan variabel implementasi (Y) Perda No. 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang

Hubungan antara variabel tingkat komunikasi (X_1) dengan variabel implementasi (Y) Perda No. 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas pasar Kota Semarang dapat dilihat dengan deskripsi tabel IV. 49 sebagai berikut:

Tabel IV. 49
TABULASI SILANG ANTARA TINGKAT KOMUNIKASI (X_1)
DENGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (Y)

Implementasi kebijakan	Tingkat komunikasi				Jumlah
	T	CT	KT	R	
T	1	5			6
	(33,33%)	(35,71%)			(12%)
CT	2	9	6		17
	(66,67%)	(64,29%)	(23,08%)		(34%)
KT			18	5	23
			(69,23%)	(71,43%)	(46%)
R			2	2	4
			(7,69%)	(28,57%)	(8%)
Jumlah	3	14	26	7	50
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Keterangan:

T = Tinggi

CT = Cukup tinggi

KT = kurang tinggi

R = Rendah

Berdasarkan tabel silang di atas dapat diketahui bahwa:

Dari 100 % mereka yang mengatakan tingkat komunikasinya tinggi (T), 66, 67 % mengatakan implementasi kebijakannya cukup tinggi (CT), sedangkan dari 100 % yang menyatakan tingkat komunikasinya cukup tinggi (CT) 64, 29 % mengatakan implementasinya cukup tinggi (CT) pula.

Sementara itu dari 100 % yang mengatakan tingkat komunikasinya kurang tinggi (KT), 69, 23 % mengatakan implementasinya kurang tinggi (KT) pula. Kemudian dari 100 % yang mengatakan tingkat komunikasinya rendah (R), 71, 43 % mengatakan implementasinya kurang tinggi (KT).

Besarnya persentase-persentase tersebut menunjukkan kecenderungan hubungan antara tingkat komunikasi dengan implementasi kebijakan.

C.2. Hubungan antara variabel sumber daya (X_2) dengan variabel implementasi (Y) Perda No. 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas pasar Kota Semarang

Hubungan antara variabel sumber daya (X_2) dengan variabel implementasi (Y) Perda No. 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas pasar Kota Semarang dapat dilihat dengan deskripsi tabel IV. 50 sebagai berikut :

Tabel IV. 50
TABULASI SILANG ANTARA SUMBER DAYA (X_2) DENGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (Y)

Implementasi kebijakan	Sumber daya				Jumlah
	T	CT	KT	R	
T	2	4			6
	(50%)	(23,53%)			(12%)
CT	2	10	5		17
	(50%)	(58,82%)	(22,73%)		(34%)
KT		3	17	3	23
		(17,65%)	(77,27%)	(42,86%)	(23%)
R				4	4
				(57,14%)	(8%)
Jumlah	4	17	22	7	50
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Keterangan:

T = Tinggi

CT = Cukup tinggi

KT = kurang tinggi

R = Rendah

Berdasarkan tabel silang di atas dapat diketahui bahwa:

Dari 100 % mereka yang mengatakan sumber daya tinggi (T), 50% mengatakan implementasi kebijakannya tinggi (T), sedangkan dari 100 % yang

menyatakan sumber dayanya cukup tinggi (CT) 58, 82% mengatakan implementasinya cukup tinggi (CT) pula.

Sementara itu dari 100 % yang mengatakan sumber dayanya kurang tinggi (KT), 77, 27 % mengatakan implementasinya kurang tinggi. Kemudian dari 100 % yang mengatakan sumber dayanya rendah (R) 57, 14 % mengatakan implementasinya rendah (R) pula.

Besarnya persentase-persentase tersebut menunjukkan kecenderungan hubungan antara sumber daya dengan implementasi kebijakan.

C.3. Hubungan antara variabel sikap aparat pelaksana (X_3) dengan variabel implementasi (Y) Perda No. 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas pasar Kota Semarang

Hubungan antara variabel sikap aparat pelaksana (X_3) dengan implementasi (Y) Perda No. 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas pasar Kota Semarang dapat dilihat dengan deskripsi tabel IV. 51 sebagai berikut :

Tabel IV. 51
TABULASI SILANG ANTARA SIKAP KERJA APARAT (X_3)
DENGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (Y)

Implementasi kebijakan	Sikap aparat pelaksana				Jumlah
	T	CT	KT	R	
T	1	2	3		6
	(33,33%)	(40%)	(13,04)		(12%)
CT	2	3	11	1	17
	(66,67%)	(60%)	(47,82%)	(5,26%)	(34%)
KT			9	14	23
			(39,13%)	(73,68%)	(46%)
R				4	4
				(21,05%)	(8%)
Jumlah	3	5	23	19	50
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Keterangan:

T = Tinggi

CT = Cukup tinggi

KT = kurang tinggi

R = Rendah

Berdasarkan tabel silang di atas dapat diketahui bahwa:

Dari 100 % mereka yang mengatakan sikap aparat pelaksana tinggi (T), 66, 67 % mengatakan implementasi kebijakannya cukup tinggi (CT), sedangkan dari 100 % yang menyatakan sikap aparat pelaksananya cukup tinggi (CT) 60 % mengatakan implementasinya cukup tinggi (CT) pula.

Sementara itu dari 100 % yang mengatakan sikap aparat pelaksananya rendah (R) 73, 68 % mengatakan implementasinya kurang tinggi (KT).

Besarnya persentase-persentase tersebut menunjukkan kecenderungan hubungan antara sikap aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan.

C. 4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini ditujukan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara masing masing variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan teknik statistik Koefisien Rank Kendall, teknik koefisien Konkordasi Kendall dan Koefisien determinan (KD). Penggunaan statistik ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel tingkat komunikasi (X_1) berhubungan dengan variabel implementasi kebijakan (Y), mengetahui seberapa besar variabel sumber daya (X_2) berhubungan dengan variabel mplementasi kebijakan (Y), dan mengetahui seberapa besar variabel sikap aparat pelaksana (X_2) berhubungan dengan variabel mplementasi kebijakan (Y) . Dengan kata lain penggunaan teknik Koefisien Rank Kendall digunakan penulis untuk menguji hipotesis minor.

Selanjutnya penulis juga akan menggunakan teknik Koefisien Konkordasi Kendall untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan diantara keriga variabel X secara bersama-sama dengan variabel Y dengan atau menguji hipotesis mayor yang diajukan. Sedangkan Koefisien Determinan (KD) digunakan untuk mengetahui pengaruh antara masing-masing variabel X terhadap variabel Y dan pengaruh variabel-variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y.

Berikut ini analisis terhadap hipotesis penelitian, adalah :

C. 4. 1. Analisis Korelasi Rank Kendall antara variabel tingkat komunikasi (X_1) dengan variabel Implementasi Kebijakan (Y)

Berdasarkan pengujian dengan SPSS (terlampir) diketahui bahwa koefisien korelasi antara variabel tingkat komunikasi (X_1) dengan variabel Implementasi (Y) sebesar $\tau_{X_1Y} = 0,671$ dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,000. Oleh karena sig sebesar $0,000 < 0,01$, maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis yang berbunyi “terdapat hubungan positif variabel tingkat komunikasi dengan implementasi”. Dengan kata lain, antara tingkat komunikasi dengan implementasi terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif. Semakin tinggi tingkat komunikasi, maka akan semakin baik pula implementasi.

Secara manual koefisien korelasi Kendall (τ_{X_1Y}) sebesar 0,671 tersebut masih perlu ditransformasikan ke dalam Z-test dengan cara sebagai berikut :

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

$$Z = \frac{0,671}{\sqrt{\frac{2(2.50+5)}{9.50(50-1)}}$$

$$Z = \frac{0,671}{\sqrt{\frac{2(100+5)}{450.(49)}}$$

$$Z = \frac{0,671}{\sqrt{\frac{2(105)}{22050}}}$$

$$Z = \frac{0,671}{\sqrt{\frac{210}{22050}}}$$

$$Z = \frac{0,671}{\sqrt{0,095238}}$$

$$Z = \frac{0,671}{0,097}$$

$$Z = 6,917$$

Berdasarkan perhitungan ditemukan harga Z hitung sebesar 6,917. Sedangkan harga Z-tabel (lihat tabel Z kritik) pada taraf signifikansi 1% (Zt 1 %) sebesar 2,74 dan Z-tabel pada 5 % (Zt5 %) sebesar 1,161. Hasil konsultasi menunjukkan harga Z-hitung (6,971) > Zt 5 % (1,161) dan Zt 1% (2,74). Hal ini berarti hipotesis penelitian yang berbunyi “terdapat hubungan positif antara variabel tingkat komunikasi dengan implementasi” **diterima**.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat komunikasi (X1) terhadap implementasi kebijakan (Y) digunakan rumus Koefisien Determinan (KD), yaitu :

$$KD = (\tau_{X1Y})^2 \cdot 100 \%$$

$$KD = (0,671)^2 \cdot 100 \%$$

$$KD = 0,4502 \cdot 100 \%$$

$$KD = 45,02 \%$$

Berdasarkan perhitungan Koefisien Determinan, dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh antara tingkat komunikasi (X1) terhadap implementasi (Y) Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar sebesar 45,02 % dan sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain.

C. 4. 2. Analisis Korelasi Rank Kendall antara variabel sumber daya (X₂) dengan variabel implementasi kebijakan (Y)

Berdasarkan pengujian dengan SPSS (terlampir) diketahui bahwa koefisien korelasi antara variabel sumber daya (X₂) dengan variabel implementasi kebijakan (Y) sebesar $\tau_{X2Y} = 0,706$ dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,000. Oleh karena sig sebesar $0,000 < 0,01$, maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis yang berbunyi “terdapat hubungan positif variabel sumber daya dengan implementasi kebijakan”. Dengan kata lain, antara sumber daya dengan implementasi kebijakan terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif. Semakin tinggi sumber daya, maka akan semakin baik pula implementasi kebijakan.

Secara manual Koefisien Korelasi Kendall (τ_{X2Y}) sebesar 0,706 tersebut masih perlu ditransformasikan ke dalam Z-test dengan cara sebagai berikut :

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}$$

$$Z = \frac{0,706}{\sqrt{\frac{2(2.50+5)}{9.50(50-1)}}$$

$$Z = \frac{0,706}{\sqrt{\frac{2(100+5)}{450.(49)}}$$

$$Z = \frac{0,706}{\sqrt{\frac{2(105)}{22050}}}$$

$$Z = \frac{0,706}{\sqrt{\frac{210}{22050}}}$$

$$Z = \frac{0,706}{\sqrt{0,095238}}$$

$$Z = \frac{0,706}{0,097}$$

$$Z = 7,278$$

Berdasarkan perhitungan ditemukan harga Z hitung sebesar 7,278. Sedangkan harga Z-tabel (lihat tabel Z kritis) pada taraf signifikansi 1% (Zt 1%) sebesar 2,74 dan Z-tabel pada 5% (Zt 5%) sebesar 1,61. Hasil konsultasi menunjukkan harga Z-hitung (5,89) > Zt 5% (1,61) dan Zt 1% (2,74). Hal ini berarti hipotesis penelitian yang berbunyi “terdapat hubungan positif antara variabel sumber daya dengan implementasi kebijakan” **diterima.**

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh sumber daya (X1) terhadap implementasi kebijakan digunakan rumus Koefisien Determinan (KD), yaitu :

$$KD = (\tau_{X2Y})^2 \cdot 100 \%$$

$$KD = (0,706)^2 \cdot 100 \%$$

$$KD = 0,4984 \cdot 100 \%$$

$$KD = 49,84 \%$$

Berdasarkan perhitungan Koefisien Determinan, dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh antara sumber daya (X1) terhadap implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar sebesar 49,84 % dan sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain.

C. 4. 3. Analisis Korelasi Rank Kendall antara variabel sikap aparat pelaksana (X3) dengan variabel implementasi kebijakan (Y)

Berdasarkan pengujian dengan SPSS (terlampir) diketahui bahwa Koefisien Korelasi Kendall antara variabel sikap aparat pelaksana (X3) dengan variabel implementasi kebijakan (Y) sebesar $\tau_{X3Y} = 0,638$ dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,000. Oleh karena sig sebesar $0,000 < 0,01$, maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis yang berbunyi “terdapat hubungan positif variabel sikap aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan”. Dengan kata lain, antara sikap aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan terdapat hubungan yang signifikan dengan

arah positif. Semakin tinggi sikap aparat pelaksana, maka akan semakin baik pula implementasi kebijakan.

Secara manual Koefisien Korelasi Kendall (τ_{XY}) sebesar 0,638 tersebut masih perlu ditransformasikan ke dalam Z-test dengan cara sebagai berikut :

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

$$Z = \frac{0,638}{\sqrt{\frac{2(2.50+5)}{9.50(50-1)}}}$$

$$Z = \frac{0,638}{\sqrt{\frac{2(100+5)}{450.(49)}}}$$

$$Z = \frac{0,638}{\sqrt{\frac{2(105)}{22050}}}$$

$$Z = \frac{0,638}{\sqrt{\frac{210}{22050}}}$$

$$Z = \frac{0,638}{\sqrt{0,095238}}$$

$$Z = \frac{0,638}{0,097}$$

$$Z = 6,577$$

Berdasarkan perhitungan ditemukan harga Z hitung sebesar 6,577.

Sedangkan harga Z-tabel (lihat tabel Z kritik) pada taraf signifikansi 1% (Zt

1%) sebesar 2,74 dan Z-tabel pada 5 % ($Z_{t 5 \%}$) sebesar 1, 161. Hasil konsultasi menunjukkan harga Z-hitung ($5, 89$) > $Z_{t5 \%}$ (1, 161) dan $Z_{t 1 \%}$ (2, 74). Hal ini berarti hipotesis penelitian yang berbunyi “terdapat hubungan positif antara variabel kemampuan aparat dengan implementasi” **diterima**.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh sikap aparat pelaksana (X3) terhadap implementasi kebijakan (Y) digunakan rumus Koefisien Determinan (KD), yaitu :

$$KD = (\tau_{X3Y})^2 \cdot 100 \%$$

$$KD = (0,638)^2 \cdot 100 \%$$

$$KD = 0,4070 \cdot 100 \%$$

$$KD = 40, 70 \%$$

Berdasarkan perhitungan Koefisien Determinan, dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh antara sikap aparat pelaksana (X3) terhadap implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang sebesar 40, 70 % dan sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain.

C.4. 4. Analisis Konkordasi Kendall antara variabel tingkat komunikasi (X_1), sumber daya (X_2), dan sikap kerja aparat (X_3) dengan variabel implementasi kebijakan (Y)

Analisis ini digunakan untuk menguji signifikansi antara 3 variabel independen yaitu tingkat komunikasi, sumber daya dan sikap aparat pelaksana yang diajukan oleh penulis dengan variabel dependennya yaitu implementasi kebijakan.

Perhitungan dengan rumus koefisien Konkordansi Kendall dengan SPSS (Terlampir) memperlihatkan harga W sebesar 0,724. Selanjutnya untuk menguji signifikansi Koefisiensi Konkordasi Kendall (W) maka harga W tersebutnya dimasukkan ke rumus Chi Kuadrat

$$X^2 = k(N-1)W$$

$$X^2 = 4(50-1)0,724$$

$$X^2 = 196 \cdot 0,724$$

$$X^2 = 141,904$$

Angka yang diperoleh diatas selanjutnya dikonsultasikan dengan harga kritis Chi Kuadrat dengan derajat bebas (db) = $N-1 = 50$ pada taraf signifikansi 1% dan 5%. Harga kritis tabel antara $N = 50$ sampai dengan 60 pada taraf signifikansi menunjukkan angka 118,22, sedangkan pada taraf signifikansi 5% menunjukkan angka 107,52. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut diketahui bahwa X^2 hasil penghitungan $> X^2$ pada taraf signifikansi 1% dan 5%, yaitu :

$$141,904 > 67,5$$

$$141,904 > 69,7$$

Berdasarkan analisis data yang menunjukkan X^2 tabel membuktikan bahwa antara tingkat komunikasi (X_1), sumber daya (X_2), dan sikap kerja aparat (X_3) mempunyai hubungan yang signifikan dengan implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang. Dengan demikian hipotesis mayor yang diajukan oleh penulis dapat **diterima**.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat komunikasi (X_1), sumber daya (X_2) dan sikap aparat pelaksana (X_3) terhadap implementasi kebijakan (Y) digunakan rumus Koefisien Determinan (KD), yaitu :

$$KD = (r_{X_1 X_2 X_3 Y})^2 \cdot 100 \%$$

$$KD = (0,724)^2 \cdot 100 \%$$

$$KD = 0,5242 \cdot 100 \%$$

$$KD = 52,42 \%$$

Berdasarkan perhitungan Koefisien Determinan, dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh antara tingkat komunikasi (X_1), sumber daya (X_2) dan sikap aparat pelaksana (X_3) terhadap implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar sebesar 52,42 % dan sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain.

Sebagai kelengkapan studi penelitian, maka dapat diperoleh pula harga koefisien non determinan, yaitu sebesar $100 \% - 52,42 \% = 47,58 \%$. Hal ini menunjukkan sebesar 47,58 % variasi yang terjadi pada implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar

Kota Semarang disebabkan oleh pengaruh variabel bebas lain di luar variabel tingkat komunikasi (X1) dan sumber daya (X2) dan sikap aparat pelaksana (X3). Oleh karena residu atau koefisien non-determinan tergolong relatif besar, maka dalam rangka *development research*, verifikasi terhadap variabel lain perlu untuk diteliti.

D. DISKUSI

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai bahan diskusi, adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Perda No. 10 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Kota Semarang bahwa bahwa implementasi perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar masih kurang berhasil terlihat dari nilai rekapitulasi skor variabel implementasi kebijakan sebgaiian besar *kurang tinggi (KT)* 46. %. Beberapa indikator yang menunjukkan adanya implementasi yang kurang berhasil adalah kurang menguasainya aparat petugas pasar terhadap informasi kebijakan, kurang pahamiannya pedagang terhadap perda pengaturan pasar, kurang lancarnya proses perijinan untuk berdagang, kurang memadainya fasilitas pelayanan yang diberikan kepada pedagang, kurang sesuainya tarif retribusi yang dibebankan kepada pedagang, kurang bermanfaatnya perda pengaturan pasar bagi pedagang, prilaku pedagang yang kurang baik dalam menjaga tempat berdagang, kurang termotivasinya pedagang dalam mendukung perda pengaturan pasar dan kurang meningkatnya fasilitas yang diterima pedagang.

2. Tingkat komunikasi yang terjadi kurang mendukung implementasi Perda No. 10 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Kota Semarang terlihat dari nilai rekapitulasi skor variabel tingkat komunikasi sebagian besar *kurang tinggi (KT)* 52 %. Beberapa indikator yang menunjukkan adanya tingkat komunikasi kurang mendukung adalah kurang seringnya (1 kali dalam singgu) pengarahan kepada pedagang, kurang lancarnya informasi kebijakan pengaturan pasar yang diterima pedagang, penggunaan bahasa yang kurang mudah dipahami oleh pedagang, kurang terperinci informasi perda pengaturan pasar yang diterima pedagang, kurang jelasnya informasi perda pengaturan pasar yang diterima pedagang, media komunikasi yang digunakan dalam proses komunikasi kurang memperjelas pesan yang diterima pedagang, kurang sesuainya informasi kebijakan yang diterima pedagang yang tertera dalam perda pengaturan pasar dan kurang sesuainya informasi perda pengaturan pasar yang diterima pedagang dengan yang disampaikan aparat petugas pasar.
3. Sumber daya yang tersedia kurang mendukung implementasi Perda No. 10 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Kota Semarang terlihat dari nilai rekapitulasi skor variabel sumber daya sebagian besar *kurang tinggi (KT)* 44 %. Beberapa indikator yang menunjukkan adanya sumber daya yang kurang mendukung adalah kurang baiknya kemampuan petugas pasar dalam menjalin kerjasama dengan pedagang, kurang baiknya kemampuan petugas pasar dalam melakukan pendekatan personal kepada pedagang pada saat terjadi konflik anatar pedagang, kurang baiknya kemampuan petugas pasar dalam

melakukan ide-ide pembaharuan dalam pengaturan pasar, kurang baiknya kemampuan petugas pasar dalam menjalankan rencana-rencana kebijakan pengaturan pasar, kurang baiknya kemampuan petugas pasar dalam memberikan pemahaman terhadap prosedur-prosedur pelayanan yang berhubungan dengan pengaturan pasar, kurang baiknya fasilitas keamanan yang diberikan kepada pedagang, kurang memadainya fasilitas penerangan yang diberikan kepada pedagang, kurang memadainya fasilitas MCK yang diberikan kepada pedagang, dan kurang memadainya fasilitas kebersihan yang diberikan kepada pedagang.

4. Sikap aparat pelaksana kurang mendukung implementasi Perda No. 10 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Kota Semarang terlihat dari nilai rekapitulasi skor variabel sikap aparat pelaksana kurang tinggi sebagian besar *kurang tinggi (KT)* 46 %. Beberapa indikator yang menunjukkan adanya sikap aparat pelaksana kurang mendukung adalah kurang loyalnya aparat petugas pasar terhadap peraturan dalam menarik retribusi dan pengaturan pasar, kurang baiknya pengabdian petugas pasar terhadap perda pengaturan pasar, kurang bertanggungjawabnya petugas pasar dalam menjalankan tugasnya melakukan pengaturan pasar, kurang menaatinya petugas pasar terhadap ketentuan retribusi dalam menjalankan retribusi pasar, kurang sopannya petugas pasar dalam menarik retribusi dan pengaturan pasar, kurang jujurnya petugas pasar dalam memberikan tarif retribusi kepada pedagang, dan petugas pasar kurang jujur dalam memberikan pelayanan perijinan kepada pedagang.

5. Beberapa hipotesis yang diajukan diterima, berikut ini hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian dari koefisien korelasi tertinggi ke yang terendah, dapat dilihat pada tabel IV. 52 dibawah ini:

Tabel IV. 52
TABEL KOEFISIEN KORELASI DAN KOEFISIEN DETERMINAN
HASIL PENELITIAN

No	Koefisien Korelasi	Besarnya Koefisien Korelasi	Urutan	Koefisien Determinan	Besarnya Koefisien Determinan	Urutan
1	X1- Y	0, 671	2	X1-Y	45, 02%	2
2	X2-Y	0, 706	1	X2-Y	49, 84%	1
3	X3-Y	0, 638	3	X3-Y	40, 70%	3

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel yang paling besar mempunyai hubungan dengan implementasi kebijakan (Y) adalah variabel sumber daya (X2) yaitu sebesar 0, 706, sedangkan variabel yang paling kuat mempunyai pengaruh dengan variabel implementasi kebijakan adalah variabel sumber daya (X2) yaitu sebesar 49, 84 %.

Kemudian hasil yang diperoleh menyangkut hipotesis mayor diterima adalah $141, 904 > 69, 7$ (sig 1 %) dan $67, 5$ (sig 5 %) dan pengaruh dari semua variasi variabel X yaitu tingkat komunikasi (X1), sumber daya (X2) dan sikap aparat pelaksana (X3) yang diajukan terhadap variabel Y adalah sebesar 52, 42 %.

Dari hal di atas tersebut sebagai kelengkapan studi penelitian, maka dapat harga koefisien non determinan, yaitu sebesar $100 \% - 52, 42 \% = 47, 58 \%$. Hal ini menunjukkan sebesar 47, 58 % variasi yang terjadi pada implementasi Perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang disebabkan oleh pengaruh variabel bebas lain di luar variabel tingkat

komunikasi (X1) dan sumber daya (X2) dan sikap aparat pelaksana (X3). Oleh karena residu atau koefisien non-determinan tergolong relatif besar, maka dalam rangka *development research*, verifikasi terhadap variabel lain perlu untuk diteliti.

Apa yang telah dikemukakan diatas tersebut jika dikaitkan dengan teori-teori yang melandasi penelitian adalah relevan. Gambaran relevannya hasil penelitian dengan teori-teori penelitian dapat dijelaskan pada paparan berikut ini:

Menurut George Edwards III (Imawan, 1999: 2), mengemukakan setidaknya ada empat variabel yang secara operasional menentukan keberhasilan / kegagalan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Sumber daya (*resources*)
3. Disposisi / sikap
4. Struktur Birokrasi

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2001; 79-8) mengembangkan model yang disebut sebagai *A model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan), bahwa :

Jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan. Variabel-variabel bebas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ukuran dan tujuan kebijaksanaan
2. Sumber-sumber kebijaksanaan
3. Ciri-ciri atau sifat badan / instansi pelaksana
4. Komunikasi antar instansi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Berdasarkan hal tersebut maka variabel yang perlu dijadikan variabel-variabel dalam penelitian adalah dependen variabel (Y) implementasi kebijakan, sedangkan yang menjadi variabel independen adalah tingkat komunikasi (X1), sumber daya (X2) dan sikap aparat pelaksana (X3).

Perlu disampaikan dalam diskusi tersebut implikasi yang muncul bilamana tingkat komunikasi, sumber daya dan sikap aparat pelaksana kurang mendukung implementasi suatu kebijakan maka kemungkinan yang terjadi adalah akan menghambat implementasi suatu kebijakan. Jadi dengan demikian jika ketiga faktor yaitu tingkat komunikasi, sumber daya dan sikap aparat pelaksana tidak diperbaiki maka kemungkinan implementasi suatu kebijakan akan semakin mengalami banyak hambatan sehingga tingkat keberhasilan suatu implementasi. Kemudian karena adanya nilai Koefisien Non Determinan yang relatif tinggi yaitu mencapai 47,8 % maka ada kesempatan terbuka bagi peneliti yang akan mengkaji implementasi Perda No. 10 Tentang Pengaturan Pasar di Kota Semarang untuk mengambil variabel yang dianggap berpengaruh dalam implementasi kebijakan tersebut.

Maka dengan demikian, mengacu pada teori-teori tentang implementasi kebijakan dari George Edwards III dan Van Horn dan Van Meter, variabel-variabel tersebut adalah dari George Edward III yaitu struktur birokrasi, sedangkan dari Van Meter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijaksanaan, ciri-ciri atau sifat badan / instansi pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

BAB V

SIMPULAN dan SARAN

A. SIMPULAN

1. Implementasi Perda No. 10 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Kota Semarang bahwa bahwa implementasi perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar masih kurang berhasil.
2. Tingkat komunikasi yang terjadi kurang mendukung implementasi Perda No. 10 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Kota Semarang bahwa bahwa implementasi perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar.
3. Sumber daya yang tersedia masih kurang mendukung Implementasi Perda No. 10 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Kota Semarang bahwa bahwa implementasi perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar.
4. Sikap aparat pelaksana masih kurang mendukung Implementasi Perda No. 10 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Kota Semarang bahwa bahwa implementasi perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar.
5. Hipotesis-hipotesis minor yang diajukan dalam penelitian diterima terlihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V. 1
TABEL KOEFISIEN KORELASI
DAN KOEFISIEN DETERMINAN
HASIL PENELITIAN

No	Koefisien Korelasi	Besarnya Koefisien Korelasi	Urutan	Koefisien Determinan	Besarnya Koefisien Determinan	Urutan
1	X1- Y	0, 671	2	X1-Y	45, 02%	2
2	X2-Y	0, 706	1	X2-Y	49, 84%	1
3	X3-Y	0, 638	3	X3-Y	40, 70%	3

Kemudian bahwa variabel yang dianggap punya korelasi dan pengaruh paling besar adalah variabel sumber daya (X2) terhadap Implementasi Perda No. 10 Tentang Pengaturan Pasar di Cabang Johar Kota Semarang bahwa bahwa implementasi perda No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar, diikuti variabel tingkat komunikasi (X2) dan sikap aparat pelaksana (X3).

6. Hipotesis yang mayor yang diajukan dalam penelitian diterima, hal ini Chi kuadrat =141, 904 > 69, 5 (sig 15) dan 67, 5 (sig 5%). Sementara itu besarnya Koefisien Determinan (KD) yaitu pengaruh antara variabel tingkat komunikasi (X1), sumber daya (X2) dan sikap aparat pelaksana (X3) dengan variabel implementasi kebijakan sebesar 52, 42 %. Sedangkan Koefisien Non Determinan selain variabel pengaruh (X) yang diajukan dalam penelitian sebesar 48, 18 %.

B. SARAN

1. Dalam rangka keperluan penelitian kedepan ada beberapa variabel yang perlu dijadikan variabel pengaruh terhadap implementasi kebijakan yang belum dijadikan variabel pengaruh dalam penelitian ini dari teorinya George Edwards III yaitu struktur birokrasi, sedangkan dari Van Meter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijaksanaan, ciri-ciri atau sifat badan / instansi pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
2. Dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja petugas pasar Kota Semarang khususnya diperlukan peningkatan kemampuan kerja bagi petugas pasar dalam bentuk pelatihan-pelatihan bagi petugas pasar, beberapa tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Membuat planning mengenai pelatihan kemampuan kerja bagi petugas pasar, meliputi:
 1. Waktu dan tempat pelatihan
 2. Materi-materi yang diajarkan dalam pelatihan bagi petugas pasar (materi tentang komunikasi, materi tentang kemampuan kerja personal, teknis dan administrasi).
 3. Metode-metode yang digunakan dalam pelatihan bagi petugas pasar
 4. Pihak-pihak yang menjadi tenaga pelatihan bagi petugas pasar
 5. Besarnya biaya pelatihan.

- b) Melakukan proses penyampaian informasi adanya pelatihan bagi petugas pasar. Dalam proses penyampaian informasi ini para petugas diberi pemberitahuan tertulis lewat surat pemberitahuan adanya pelatihan kemudian diadakan sosialisasi dengan petugas pasar mengenai maksud dan tujuan adanya pelatihan.
 - c) Pelaksanaan pelatihan petugas pasar, yang berupa tindakan pelaksanaan pelatihan yang berupa pengenalan teori-teori tentang kemampuan silaturahmi, konseptual, dan administratif, serta communication skill melakukan diskusi dan simulasi praktek dalam pengaturan pasar.
 - d) Pelaksanaan hasil pelatihan dan evaluasi berkesinambungan kemampuan kerja petugas pasar. Petugas pasar melakukan proses kerja pengaturan pasar dengan mempraktekan hasil pelatihan dan dinas pasar membuat standar kinerja keberhasilan sebagai bahan untuk evaluasi kemampuan kerja petugas pasar.
3. Fasilitas-fasilitas pelayanan pasar perlu ditingkatkan oleh institusi yang berwenang dalam pengaturan pasar baik menambah kuantitas dan peningkatan kualitas MCK, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana kebersihan, menambah kuantitas dan kualitas sarana penerangan dan meningkatkan kualitas pelayanan keamanan pasar.
 4. Setiap petugas pasar diharapkan diberi buku tentang Perda Pengaturan Pasar dan pedagang perlu diharapkan untuk membeli buku Perda tentang

Pengaturan Pasar. Pihak Dinas Pasar selaku institusi yang berwenang menjalankan kebijakan tersebut mewajibkan para pedagang untuk membeli buku Perda Tentang Pengaturan Pasar dan Dinas Pasar Kota Semarang menyediakannya dengan harga yang relatif bisa dijangkau oleh pedagang. Manfaat yang dapat diperoleh dengan dimilikinya buku Perda tentang Pengaturan Pasar tersebut adalah diharapkan petugas pasar dan pedagang mengerti dan paham mengenai kebijakan tentang Pengaturan Pasar di Kota Semarang sehingga Dinas Pasar kemungkinan besar akan lebih mudah dalam menerpakan peraturan tersebut karena berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut sudah mengerti dan paham mengenai kebijakan tentang pengaturan pasar.

5. Pemerintah Kota Semarang Dinas Pasar Kota Semarang pada khususnya sebisa mungkin didalam peraturan tersebut memuat materi-materi tentang masalah pengaturan pasar yang lebih bersifat komprehensif dan detail yang berisi, adalah:
 - a. Jenis-jenis dan besarnya pungutan retribusi pasar
 - b. Prosedur, besarnya biaya yang transparan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam perijinan pasar.
 - c. Bentuk-bentuk bangunan pasar yang disediakan kepada pedagang.
 - d. Hak-hak yang didapatkan oleh pedagang dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pedagang. Hak pedagang berisi bentuk pelayanan apa saja yang diberikan Pemerintah Kota Semarang pada pedagang dan kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan oleh para pedagang.

- e. Bentuk-bentuk pelanggaran dan bentuk-bentuk serta kategori-kategori sanksi bagi pedagang yang melanggar.
 - f. Tata cara pengaduan pedagang bagi pedagang yang merasa dirugikan oleh kebijakan.
6. Proses komunikasi Perda Pengaturan Pasar perlu diintensifkan baik dilakukan secara personal oleh petugas dalam periode waktu tertentu seminggu 3 kali secara rutin dan terus-menerus maupun secara bersama-sama dalam pertemuan-pertemuan yang melibatkan pedagang dan Dinas Pasar Kota Semarang dalam periode dua minggu sekali secara rutin dan terus menerus, media komunikasi yang digunakan dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar perlu ditambah tidak hanya lewat surat tapi juga, lewat brosur-brosur, famplet dan papan informasi disetiap pasar sehingga pedagang akan semakin mengerti dan paham mengenai perda pengaturan pasar dan tahu tentang informasi-informasi terbaru mengenai kebijakan pengaturan pasar. Dalam proses komunikasi kebijakan pengaturan pasar para petugas mengusahakan untuk menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pedagang, informasinya terperinci, jelas dan memperhatikan kesesuaian antara pesan yang terkandung dalam kebijakan dengan yang disampaikan oleh petugas pasar.
7. Dalam rangka meningkatkan sikap aparat petugas pasar Kota Semarang khususnya diperlukan peningkatan sikap aparat petugas pasar dalam

bentuk pelatihan-pelatihan bagi petugas pasar, beberapa tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Membuat planning mengenai pelatihan sikap aparat petugas pasar, meliputi:
 1. Waktu dan tempat pelatihan
 2. Materi-materi yang diajarkan dalam pelatihan sikap aparat petugas pasar
 3. Metode-metode yang digunakan dalam pelatihan sikap aparat petugas pasar
 4. Pihak-pihak yang menjadi tenaga pelatihan bagi petugas pasar
 5. Besarnya biaya pelatihan..
- b) Melakukan proses penyampaian informasi adanya pelatihan sikap aparat bagi petugas pasar. Dalam proses penyampaian informasi ini para petugas diberi pemberitahuan tertulis lewat surat pemberitahuan adanya pelatihan kemudian diadakan pertemuan sosialisasi dengan petugas pasar mengenai maksud dan tujuan adanya pelatihan.
- c) Pelaksanaan pelatihan petugas pasar, yang berupa tindakan pelaksanaan pelatihan yang berupa pengenalan teori-teori tentang sikap aparat, melakukan diskusi tentang sikap aparat melakukan simulasi praktek dalam pengaturan pasar.
- d) Pelaksanaan hasil pelatihan dan evaluasi berkesinambungan sikap aparat petugas pasar. Petugas pasar melakukan proses kerja

pengaturan pasar dengan mempraktekan hasil pelatihan sikap parat petugas pasar dan dinas pasar membuat standar kinerja keberhasilan sebagai bahan untuk evaluasi sikap aparat petugas pasar.

8. Dalam rangka mempermudah proses perijinan untuk berdagang bagi calon pedagang di kantor tempat melakukan perijinan diberikan papan informasi prosedur dan tata cara perijinan dan perpanjangan ijin berjualan. Papan informasi tersebut memuat beberapa materi dasar, yaitu:
 - a. Persyaratan – persyaratan administratif
 - b. Lama pengurusan ijin dan besarnya biaya
 - c. Prosedur pengurusan ijin berdagang dan perpanjangan ijin berdagang
 - d. Fasilitas yang didapatkan bagi pedagang
 - e. hak dan kewajiban pedagang serta bentuk-bentuk sangsi bagi pedagang yang melanggar.
9. Di setiap pasar diberikan papan informasi/ pengumuman tentang kebijakan pengaturan pasar, yang berisi yaitu:
 - a. Tujuan dan manfaat adanya kebijakan pengaturan pasar
 - b. Fasilitas pelayanan yang didapatkan bagi petugas pasar
 - c. Hak dan kewajiban pedagang
 - d. Jenis dan besarnya retribusi pasar
 - e. Informasi-informasi terbaru tentang kebijakan pengaturan pasar

10. Dalam usaha mencegah adanya kebocoran pendapatan PAD retribusi pasar maka diperlukan pendataan kembali pedagang sesuai dengan jenis bangunan yang didapat (Kios, Los, Dasaran) berapa jumlah pedagang seluruhnya dan kemudian Dinas Pasar mewajibkan kepada petugas pasar untuk mengkorporasi tiap lembar retribusi pasar yang dikeluarkan oleh petugas pasar. Keadaan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan gambaran secara jelas mengenai seberapa besar PAD yang didapat dari retribusi pasar dalam periode waktu tertentu dan mencegah secara dini pembocoran pendapatan dari retribusi pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1990, *Analisis Kebijakan Publik dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 2001, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin, 2002, *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badjuri, Abdul Kahar dan Yuwono, Teguh, 2002, *Kebijaksanaan Publik Konsep & Strategi*, Ilmu Pemerintahan, FISIP UNDIP, Semarang.
- Bryant, Coraly dan White, Louise. D, 1988, *Manajemen Pembangunan*, Terjemahan Rusyanto L Simatupang, LP3ES, Jakarta.
- Dye, Thomas. R, 1978, *Understanding Public Policy*, New York: Prentice Hall Inc.
- Edward III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quartelly Press, Wahingtin D. C, disunting oleh Dra. Hartuti Purnaweni, 1991, Diktat Kuliah Kebijakan Publik.
- Effendi, Sofian, 2001, *Kuliah Umum Perdana MAP UNDIP Angkatan I*, Semarang.
- Gibbson, L. James, Dkk, 1990, *Proses dan Struktur Perilaku Organisasi*, Terjemahan Djakarsih, Editor Agus Dharma, Erlangga, Jakarta.
- Imawan, Riswanda, 1999, *Kebijakan Publik*, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Islamy, Irfan, 1996, *Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Jiwanto, Gunawan, 1985, *Komunikasi Dalam Organisasi*, Pusat Pengembangan Manajemen Andi Offset, Jogyakarta.
- Moenir, A. S, 1987, *Pendekatan Manusia dan Organisasi terhadap Pembinaan Pegawai*, Gunung Agung, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1989, *Metodologi Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Subana M dan Sudrajat S, 2001, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia Bandung.

Sugiono, 1997, *Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan V, Alfabet, Bandung.

Thoha, Miftah, 1990, *Aspek-Aspek Pokok Ilmu-Ilmu Administrasi*, Ghalia, Jakarta.

Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, MedPress, Jogjakarta.

Wirawan Sarwono, Sarlito, 1998, *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*, PT Balai Pustaka, Jakarta.

Yuwono. S, 1985, *Ikhtisar Komunikasi Administrasi*, Liberty, Yogyakarta.

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang No 25 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah dengan Pusat

Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pasar

Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar Kota Semarang.

Harian Umum Suara Merdeka, Halaman 17, Tanggal 20 Mei 2004.